



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025
REVISI 2025

EKONOMI BIRU
UNTUK
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
POVERTY GROWTH



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2025



Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Kinerja organisasi wajib dilaporkan sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas fungsi yang dilaksanakan dan dituangkan dalam **Laporan Kinerja (Lkj)**. Hal tersebut sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada Sekretariat Ditjen. PSDKP selama tahun anggaran berjalan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Pada tahun 2025 atas kinerja yang telah ditorehkan dengan dinamika kebijakan pemerintah di awal tahun anggaran 2025, Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP sebesar **113,11%**. Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh pimpinan dan pegawai Sekretariat Ditjen PSDKP. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sinergi dan kerjasamanya, semoga di periode selanjutnya tetap dapat mempertahankan sinergi dan kerjasama yang lebih baik.

Jakarta, Januari 2026

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Saiful Umam

**Ditandatangani
Secara Elektronik**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 revisi tertanggal 15 Desember 2025. Nilai kinerja organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025 atas 3 Sasaran Kegiatan dengan 24 indikator kinerja sebesar **113,11%**. Sebanyak 12 indikator kinerja diantaranya memiliki performa istimewa.

Meskipun terdapat dinamika dalam kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran kementerian/lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025, kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP dengan program dukungan manajemen internal lingkup Ditjen PSDKP dapat dilaksanakan dengan baik. hal ini tak lepas dari beberapa upaya terbaik yang telah dilakukan diantaranya 1) 1) pemanfaatan media sosial sebagai *strategic campaign* Ditjen PSDKP dengan masyarakat dan pengguna jasa PSDKP, 2) loyalitas melalui advokasi hukum atas kasus pidana yang menjadi perhatian nasional mampu meningkatkan engagement pegawai atas tugas dan fungsi organisasi Ditjen PSDKP, 3) komitmen Pemimpin unit kerja dan keterlibatan aktif pegawai yang senantiasa dijaga pada lingkungan yang kondusif melalui Jam Pimpinan Mendengar dan Ngobras.

Dengan adanya kendala pada alokasi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP yang menghambat pelaksanaan kegiatan, namun tidak secara langsung menghambat kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP di tahun 2025. Sebagai upaya perbaikan agar merujuk rekomendasi strategi perbaikan untuk periode selanjutnya pada setiap indikator kinerja dan menjadikannya sebagai umpan balik strategi perencanaan tahun 2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
BAB IV PENUTUP.....	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Ditjen PSDKP.....	5
Tabel 3.1 Realisasi persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	15
Tabel 3.2 persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	23
Tabel 3.3 Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani.....	28
Tabel 3.4 Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	30
Tabel 3.5 Realisasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PSDKP	33
Tabel 3.6 Realisasi Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	35
Tabel 3.7 Realisasi Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP.....	38
Tabel 3.8 Realisasi PM SAKIP Ditjen PSDKP	41
Tabel 3.9 Realisasi Nilai maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	44
Tabel 3.10 Realisasi indikator kinerja persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	46
Tabel 3.11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP.....	39
Tabel 3.12 Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP	51
Tabel 3.13 Realisasi Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	54
Tabel 3.14 Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	55
Tabel 3.15 Persentase penyelesaian program penyusunan perundang- undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.....	57
Tabel 3.16 Realisasi Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	58
Tabel 3.17 Realisasi nilai pembangunan integritas Ditjen PSDKP	60
Tabel 3.18 Hasil LKE pemantauan pembangunan integritas Ditjen PSDKP tahun 2025	61
Tabel 3.19 Realisasi nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP	62

Tabel 3.20 Realisasi Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	66
Tabel 3.21 Hasil penilaian Lomba Inovasi Ditjen PSDKP Unit Kerja Pusat tahun 2025	67
Tabel 3.22 Realisasi Nilai implementasi program budaya kerja	69
Tabel 3.23 Realisasi nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	70
Tabel 3.24 Nilai internal keterbukaan informasi publik	71
Tabel 3.25 Realisasi persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP tahun 2025	76
Tabel 3.26 Persentase implementasi kerja sama	77
Tabel 3.27 Realisasi Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	79
Tabel 3.28 Realisasi persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP Ditjen PSDKP	83
Tabel 3.29 Realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP program Dukungan Manajemen Tahun 2025	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jumlah followers, tayangan, jangkauan konten media pada Instagram Ditjen PSDKP Tahun 2025.....	16
Gambar 3.2 Jumlah followers, tayangan, jangkauan konten media pada Facebook Ditjen PSDKP Tahun 2025.....	17
Gambar 3.3 Perbandingan jumlah followers akun media sosial X Ditjen PSDKP tahun 2025.....	18
Gambar 3.4 Jumlah followers dan interaksi pada konten media pada Tiktok Ditjen PSDKP Tahun 2025	19
Gambar 3.5 Jumlah followers, tayangan dan subscriber media sosial YouTube Ditjen PSDKP tahun 2025.....	20
Gambar 3.6 top isu pemberitaan relevan terkait Ditjen PSDKP	24
Gambar 3.7 Sebaran sentiment pemberitaan Ditjen PSDKP tahun 2025.....	25
Gambar 3.8 Visibilitas pemberitaan Ditjen PSDKP tahun 2025	25
Gambar 3.9 Grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP tahun 2025.....	31
Gambar 3.10 realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran unit kerja KKP tahun 2025.....	32
Gambar 3.11 indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025	33
Gambar 3.12 realisasi indikator nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PSDKP	34
Gambar 3.13 Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup KKP tahun 2025.....	36
Gambar 3.14 IP ASN unit kerja lingkup KKP tahun 2025	39
Gambar 3.15 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup KKP tahun 2025	42
Gambar 3.16 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP lingkup KKP tahun 2025.....	45
Gambar 3.17 persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	49
Gambar 3.18 Realisasi Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK KKP tahun 2024	52
Gambar 3.19 Indeks pelayanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP tahun 2025.....	54
Gambar 3.20 Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	55
Gambar 3.21 Hasil penilaian pembangunan integritas di lingkungan KKP tahun 2025.....	61

Gambar 3.22 Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Ditjen PSDKP tahun 2025.....	63
Gambar 3.23 Hasil penilaian implementasi budaya kerja lingkup Ditjen PSDK Tahun 2025	69
Gambar 3.24 Kanal permohonan informasi publik Ditjen PSDKP tahun 2025.....	71
Gambar 3.25 pemetaan permohonan informasi melalui PPID tahun 2025	72
Gambar 3.26 pemetaan pengaduan melalui PPID tahun 2025	72
Gambar 3.27 Grafik Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diunggah pada aplikasi SIRUP lingkup KKP Triwulan IV tahun 2025	76
Gambar 3.28 Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU tahun 2023-2025	80
Gambar 3.29 Grafik realisasi penyelesaian proses bisnis dan SOP unit kerja lingkup KKP tahun 2025.....	87

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna mendukung implementasi ekonomi biru di Indonesia. Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen PSDKP bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian sumber daya laut serta menegakkan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan ekosistem perairan nasional.

Dalam mendukung tugas utama Ditjen PSDKP, Sekretariat Ditjen PSDKP memiliki fungsi yang sangat krusial, terutama dalam aspek perencanaan, administrasi, keuangan, koordinasi, serta pengelolaan sumber daya manusia dan logistik. Sekretariat berperan dalam memastikan efektivitas operasional serta optimalisasi anggaran guna mendukung berbagai program dan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan, seperti pemberantasan illegal fishing, penguatan pengawasan wilayah perairan, serta pengembangan teknologi pemantauan perikanan.

Pelaksanaan ekonomi biru sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan menuntut pengawasan yang lebih ketat serta sistem administrasi yang efisien dan responsif. Oleh karena itu, laporan kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai capaian, tantangan, serta efektivitas kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP dalam mengawal implementasi ekonomi biru.

Laporan ini akan mengevaluasi berbagai aspek kinerja, termasuk efektivitas tata kelola organisasi, efisiensi pengelolaan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, serta inovasi dalam sistem administrasi dan pengawasan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan penguatan peran Sekretariat Ditjen PSDKP dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Ditjen. PSDKP telah menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP tahun 2025 yang menginformasikan capaian kinerja selama periode bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP tahun 2025 adalah:

- 1) Sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP kepada seluruh stakeholder.
- 2) Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

C. TUGAS dan FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Tugas Sekretariat Ditjen. PSDKP adalah melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025, Sekretariat Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- h. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- j. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

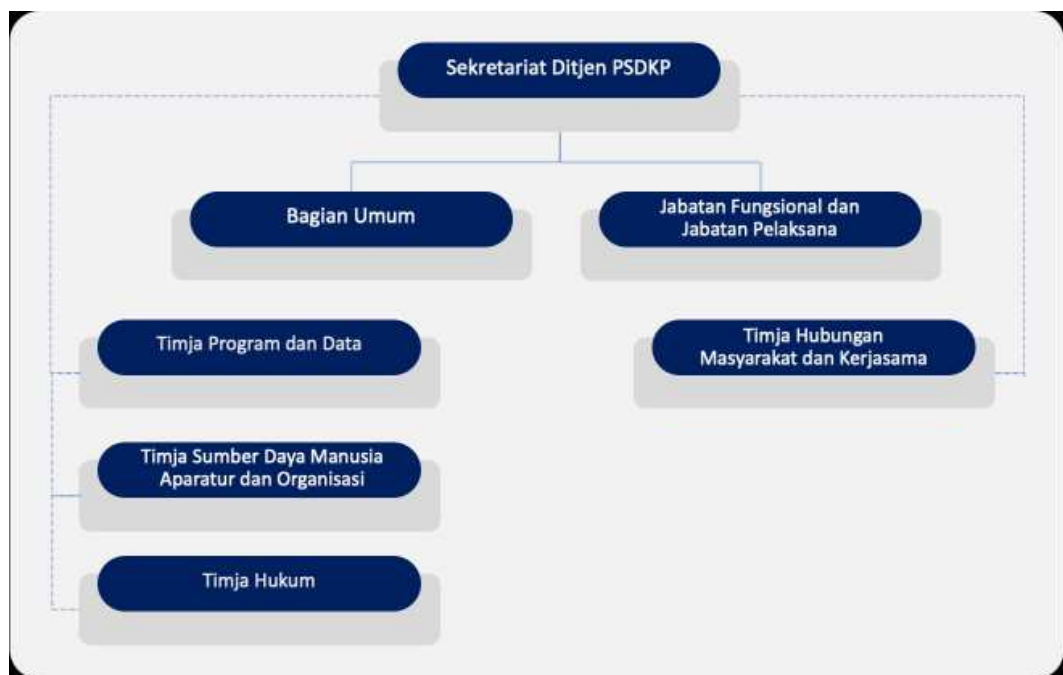
D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautdan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP maka struktur organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP terdiri dari Kepala Bagian Umum, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.1432/PSDKP.1/KP.440/IV/2025 tanggal 8 April 2025 maka struktur organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP ditambah Tim Kerja sebagai berikut:

1. Tim Kerja Program dan Data
2. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
3. Tim Kerja Hukum
4. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
5. Tim Kerja Keuangan dan Umum

Lebih lanjut merujuk kembali pada Peraturan Menteri Kelautdan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, maka Tim Kerja Keuangan dan Umum tidak lagi efektif dan pada struktur organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP terdapat Bagian Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Ditjen PSDKP.

Struktur organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP sebagaimana tersaji pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025 secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Ditjen. PSDKP, serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP tahun 2025 dan jika ada kendala kinerja, merekomendasikan perbaikan kinerja untuk periode berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA DITJEN PSDKP 2025-2029

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini dalam proses penyusunan rencana strategis KKP tahun 2025-2029, sehingga penyusunan renstra Ditjen PSDKP menunggu pengesahan Renstra KKP.

Hingga tahun 2025, rancangan akhir dokumen Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 belum ditetapkan. Dokumen perencanaan tersebut akan pedoman perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2025 Sekretariat Ditjen PSDKP telah menyepakati dua Sasaran Kegiatan dan 33 indikator sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025 tertanggal 24 Januari 2025 sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025

Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025
Sasaran Kegiatan 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP			
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	71,5
2	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai anggaran (%)	%	100
3	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	92
4	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai IKPA (%)	%	100
5	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	77
6	Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP	%	95
7	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	Indeks	81
8	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	Nilai	88

Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025
9	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	Nilai	3,35
10	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	%	100
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	%	85
12	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	95
13	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP	Nilai	<0,5
14	Nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP	Nilai	88,5
15	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	88,5
16	Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	%	100
17	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100
18	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	70
19	Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	%	100
20	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Unit	16
21	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	80
22	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP	Nilai	80
23	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	Nilai	78
24	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen PSDKP	Nilai	83
25	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	Unit	1
26	Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP	%	100
27	Nilai implementasi program budaya kerja	Nilai	70
28	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	Nilai	60

Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025
29	Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	Indeks	80
30	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	%	76
Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Efektif			
31	Persentase implementasi kerja sama luar negeri	%	80
32	Persentase dokumen kerjasama dalam negeri yang ditandatangani	%	80
33	Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	indeks	80

Dalam perkembangan rancangan akhir dokumen Reanstra Ditjen PSDKP 2025-2029, terdapat penyesuaian pada strategi dan kebijakan kelautan dan perikanan, sehingga dilakukan revisi dokumen perencanaan termasuk Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025 tertanggal 15 Desember 2025. Sasaran Kegiatan mengalami perubahan demikian juga dengan indikator kinerja program dukungan manajemen mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025
Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif			
1	Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100
2	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	85
Sasaran Kegiatan 2: Terselenggarakannya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan			
3	Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani	%	70
Sasaran Kegiatan 3: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
4	Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP	Nilai	71,5
5	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP	Nilai	92
6	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	Nilai	77
7	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	Indeks	81
8	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	Nilai	88

Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025
9	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	Nilai	3,35
10	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	%	100
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	%	85
12	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP	Nilai	<0,5
13	Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	Indeks	3,6
14	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100
15	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	70
16	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PSDKP	Nilai	77
17	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP	Nilai	80
18	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	76
19	Nilai implementasi program budaya kerja	Nilai	70
20	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	Nilai	60
21	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	%	76
22	Persentase implementasi kerja sama	%	80
23	Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	Indeks	80
24	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP Ditjen. PSDKP	%	65

C. ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DUKUNGAN MANAJEMEN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh Sekretariat Ditjen PSDKP. Isu-isu ini menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan serta implementasi kebijakan ekonomi biru. Beberapa permasalahan utama dalam dukungan manajemen antara lain:

1. Keterbatasan Jumlah dan Kompetensi SDM Pengawasan (Polsus PWP3K, AKP, dan PPNS)

- a. Keterbatasan kuantitas SDM berpengaruh pada kecepatan penanganan kasus pelanggaran baik pidana maupun administratif
 - b. Keterbatasan dalam kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pemanfaatan teknologi pengawasan serta penerapan regulasi yang kompleks
 - c. Keterbatasan kuantitas SDM yang mengelola media sosial Ditjen PSDKP khususnya untuk pemberitaan kinerja pengawasan SDKP secara profesional dan kontinu
2. Belum Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pengawasan SDKP terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memadai
- a. Terbitnya PP 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko membuat aturan teknis pengawasan SDKP mengalami penyesuaian
 - b. NSPK yang seyogyanya diterapkan harus merujuk pada aturan turunan PP Nomor 28 tahun 2025 yang belum disahkan
 - c. Diperlukan percepatan dalam penyusunan NSPK agar pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat berjalan dengan tepat dan efektif.

Isu-isu ini menjadi perhatian utama dalam peningkatan efektivitas pengawasan dan dukungan manajemen di lingkungan Ditjen PSDKP. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penyusunan regulasi yang lebih jelas.

D. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai salah satu komponen implementasi SAKIP dilaksanakan dengan klarifikasi data kinerja yang telah dicapai atas target yang telah ditetapkan, pembahasan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, disertai dengan verifikasi dan reuiu data kinerja. Penghitungan kinerja dilaksanakan secara berkala bagi indikator kinerja yang

telah ditetapkan target interim. Untuk target yang ditetapkan dalam satu tahun maka penghitungan kinerja dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Untuk unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk Ditjen PSDKP dan satker lingkup Ditjen PSDKP serta Dekonsentrasi, hasil penghitungan capaian kinerja diinput kedalam Sistem Aplikasi Pengelolaan kinerja (SAPK) KKP melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Hasil penghitungan capaian kinerja dituangkan ke dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis pembahasan merujuk Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Hingga akhir periode anggaran 2025, Sekretariat Ditjen PSDKP telah menetapkan tiga Sasaran Kegiatan yaitu 1) Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif, 2) Terselenggarakannya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan, dan 3) Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan 24 indikator sasaran kegiatan. Tahun 2025 atas kinerja yang telah ditorehkan, Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP mengalami peningkatan dari 107,32% pada triwulan III menjadi **113,11%**. Secara detil capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW IV	Realisasi	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif					
1	Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	100%	100,5%	100,5%
2	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	85%	85%	98.31%	115,66%
Sasaran Kegiatan 2: Terselenggarakannya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan					
3	Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani	70%	70%	100%	120%
Sasaran Kegiatan 3: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW IV	Realisasi	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
4	Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP	71.5	71.5	85,31	119,31%
5	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP	92	92	93.45	101,58%
6	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	77	77	77.88	101%
7	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81	81	85.17	105%
8	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88	88	89.97	102%
9	Nilai maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3.35	3.35	4,705	120%
10	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100%	100%	100%	100%
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	85%	85%	100%	117,65%
12	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5	<0.5	0.005	120%
13	Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	3,6	3.6	3,75	120%
14	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	100%	100%	100%
15	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	70	89.81	120%
16	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PSDKP	77	77	82.24	106,81%
17	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP	80	80	100	120%

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW IV	Realisasi	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
18	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	76	76	82.52	108,58%
19	Nilai implementasi program budaya kerja	70	70	81.68	116,69%
20	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	60	60	80	120%
21	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	76%	76%	100%	120%
22	Persentase implementasi kerja sama	80%	80%	80%	100%
23	Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	80	100	120%
24	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP Ditjen. PSDKP	65%	65%	70%	107,69%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP sepanjang tahun 2025 dituangkan dalam dua puluh empat indikator sasaran kinerja yang dihitung capaiannya. Secara lebih detil dijabarkan progres kinerja atas indikator kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP sebagai berikut:

ISK 1.1.1 Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator ini mengukur efektivitas dan konsistensi Ditjen PSDKP dalam mendiseminasikan informasi, kebijakan, serta hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada masyarakat luas melalui platform media sosial (Instagram, X, Facebook, TikTok, dan Youtube). Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029, yang diukur dari konten media sosial yang diproduksi dan dipublikasikan pada

media sosial Ditjen PSDKP dari target produksi konten yang ditetapkan pada kalender editorial. Realisasi atas indikator dimaksud disajikan pada tabel 3.2

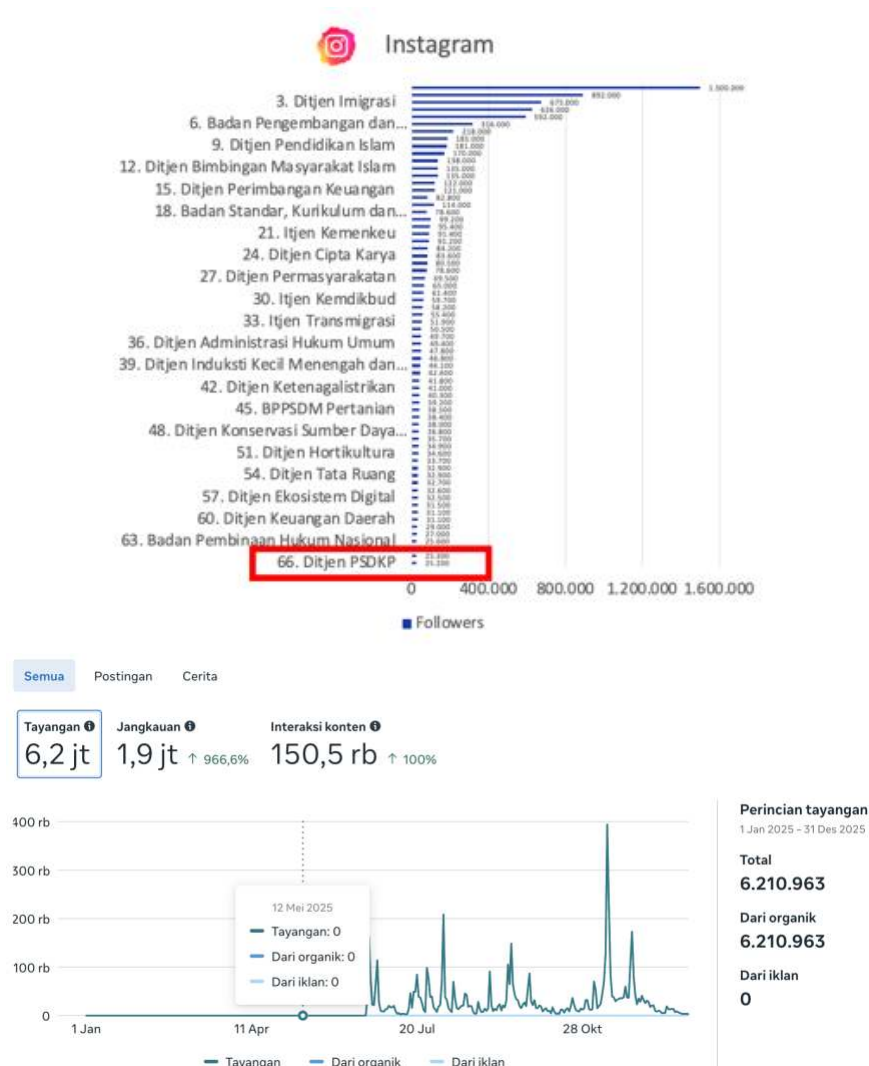
Tabel 3.2 Realisasi persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator kinerja	Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	100	100,5	100,5%
2029	100	-	-

Dari tabel 3.2 dapat dilihat realisasi indikator kinerja dimaksud sebesar 100,5% dari target 100%. Sepanjang tahun 2025, media sosial Direktorat Jenderal PSDKP mempublikasikan sebanyak 367 konten, yang terdiri dari konten infografis (*poster/carousel*) maupun video pendek (*reels/short*). Konten tersebut diunggah melalui platform media sosial Ditjen PSDKP yang terdiri dari Instagram, Facebook, TikTok, X (Twitter), serta YouTube. Berikut merupakan capaian kinerja dari masing-masing platform media sosial.

1. Instagram

Sepanjang tahun 2025, konten-konten Ditjen PSDKP dilihat sebanyak 6,2 juta kali, mendapat interaksi (*likes, comment, share* dan *save*) sebesar 150,5 ribu dan diikuti sebanyak 4.137 followers baru. Konten terbaik adalah konten mengenai Infografis Daftar Jenis Ikan Dilindungi di Indonesia (*1,4 juta views*) sebagaimana tersaji pada gambar 3.1



Gambar 3.1 Jumlah followers, tayangan, jangkauan konten media pada Instagram Ditjen PSDKP Tahun 2025

2. Facebook

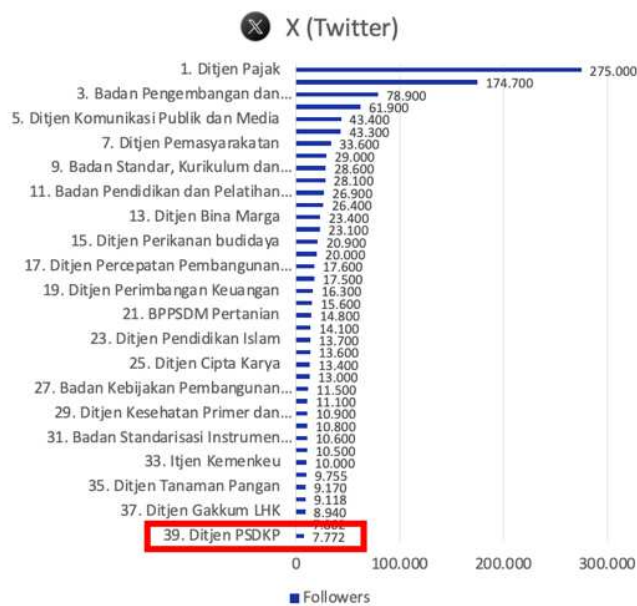
Sepanjang tahun 2025, konten-konten Ditjen PSDKP dilihat sebanyak 12,2 juta kali, mendapat interaksi (*likes, comment, share* dan *save*) sebesar 214,2 ribu dan diikuti sebanyak 22.685 followers baru. Konten terbaik adalah konten mengenai Video Momen Awak Kapal Pengawas Potong Rumpon Ilegal (3,7 juta *views*) sebagaimana tersaji pada gambar 3.2



Gambar 3.2 Jumlah followers, tayangan, jangkauan konten media pada Facebook Ditjen PSDKP Tahun 2025

3. X

Sementara untuk X (Twitter), sepanjang tahun 2025, konten-konten Ditjen PSDKP dilihat sebanyak 50,4 ribu kali, mendapat interaksi (*likes, comment, share* dan *save*) sebesar 3.437 akan tetapi tidak bertambah followers baru. Konten terbaik adalah konten mengenai Siaran Pers KKP Gagal Aksi Illegal Fishing oleh Kapal Ikan Asing Filipina Berukuran Jumbo (24,3 *ribu views*). Berikut merupakan komparasi jumlah followers X (Twitter) Ditjen PSDKP dibandingkan akun X (twitter) pemerintah lingkup Eselon I sebagaimana tersaji pada gambar 3.3



Gambar 3.3 Perbandingan jumlah followers akun media sosial X Ditjen PSDKP tahun 2025

4. Tiktok

Sepanjang tahun 2025, konten-konten Ditjen PSDKP dilihat sebanyak 4,3 juta kali, mendapat interaksi (*likes, comment, share* dan *save*) sebesar 84,2 ribu dan diikuti sebanyak 4,100 followers baru. Konten terbaik adalah konten mengenai Video KKP Tertibkan 20 Rumpon Ilegal (*594 ribu views*) sebagaimana tersaji pada gambar 3.4



Gambar 3.4 Jumlah followers dan interaksi pada konten media pada Tiktok Ditjen PSDKP Tahun 2025

5. YouTube

Sepanjang tahun 2025, konten-konten Ditjen PSKDP dilihat sebanyak 1,9 juta kali, ditonton sebanyak 65,9 ribu jam dan diikuti sebanyak 4,600 followers baru. Konten terbaik adalah konten mengenai Video Kapal Ikan Asing Asal Vietnam Lagi-Lagi Tertangkap Curi Ikan di Selat Malaka (*145 ribu views*) sebagaimana tersaji pada gambar 3.5



Gambar 3.5 Jumlah followers, tayangan dan subscriber media sosial YouTube Ditjen PSDKP tahun 2025

Berdasarkan performa pada media sosial Ditjen PSDKP tahun 2025, aktifitas produksi konten sosial media cukup tinggi dan konsisten, dimana sejumlah 367 konten dipublikasikan maka mencerminkan setidaknya satu konten diproduksi dan dipublikasikan setiap hari di lintas platform. Melihat performa jangkauan Facebook paling signifikan bagi Ditjen PSDKP sebesar 12,2 juta tayangan yang didorong dari penayangan video aksi lapangan, seperti momen pemotongan rumpon ilegal yang mendapatkan 3,7 juta views, maka dapat disarikan sebagian besar interaksi dengan audiens nelayan terjadi di platform Facebook. Selanjutnya pada platform Instagram, konten informatif berupa infografis Daftar Jenis Ikan Dilindungi menjadi konten terbaik dengan raihan

1,4 juta views. Hal ini menunjukkan audiens Instagram merespons positif konten edukasi yang dikemas secara visual. meskipun demikian terdapat tantangan pada pertumbuhan followers dan pada platform X. Peringkat jumlah followers Ditjen PSDKP masih berada di papan tengah-bawah jika dibandingkan Unit Eselon I Kementerian lain (misalnya peringkat 66 di Instagram dan 14 di Facebook). Sementara platform X (Twitter) menunjukkan performa terendah dengan nol pertumbuhan followers baru sepanjang tahun.

Adapun kendala yang dijumpai dalam pengelolaan dan produksi konten media sosial Ditjen PSDKP antara lain sebagai berikut:

1. jumlah platform media sosial yang banyak, menjadikan admin tidak bisa fokus mengembangkan seluruh platform secara merata.
2. konten pada masing-masing platform masih cenderung seragam, belum dibedakan, karena admin dan editor konten juga memiliki penugasan lain, tidak hanya berfokus pada pengelolaan media sosial.
3. saat ini, admin media sosial pemerintahan pada umumnya memiliki perangkat handphone khusus yang digunakan untuk mengambil gambar dan mengolah gambar sekaligus sehingga pengolahan bahan publikasi lebih efisien dan cepat tayang. Sementara tim Humas Ditjen PSDKP masih menggunakan kamera DSLR sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memindah gambar ke komputer/laptop dan mengedit melalui komputer/laptop, sehingga kurang fleksibel, efektif, serta efisien.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang produksi konten sosial media antara lain:

1. bimtek kehumasan lingkup Ditjen PSDKP di Pangkalan PSDKP Jakarta yang diikuti oleh unit kerja kantor pusat secara langsung dan 13 UPT PSDKP secara daring.
2. rapat evaluasi humas lingkup Ditjen PSDKP dengan peserta unit kerja pusat dan UPT PSDKP
3. pendampingan evaluasi PPID lingkup KKP

4. keikutsertaan pada sosialisasi kehumasan dari BHKLN KKP

Sebagai upaya perbaikan untuk periode selanjutnya direkomendasikan beberapa strategi sebagai berikut:

1. spesialisasi Konten Berbasis Platform: mengingat konten penertiban rumpon ilegal sangat sukses di Facebook (3,7 juta views) dan TikTok 9594 ribu views), fokuskan produksi video pendek pada aspek penegakan hukum dan aksi heroik petugas di lapangan. Sementara perbanyak konten infografis mengenai kebijakan untuk mempertahankan *engagement* tinggi di Instagram.
2. optimasi Konten Viral untuk Konversi Followers: terdapat kesenjangan antara jumlah tayangan (juta-an) dengan pertumbuhan pengikut (ribuan). Direkomendasikan untuk menyisipkan *Call to Action* (CTA) yang lebih kuat di akhir setiap video aksi untuk mengajak audiens mengikuti akun resmi guna mendapatkan *update* pengawasan laut secara *real-time*.
3. Revitalisasi Platform X: mengingat konten terbaik di X adalah Siaran pers (24,3 ribu views), tim humas sebaiknya memposisikan X sebagai kanal *breaking news* dan pusat rilis resmi, dengan format *thread* (utas) yang lebih interaktif untuk memicu pertumbuhan pengikut.
4. Peningkatan Engagement melalui Interaksi Aktif: total interaksi di Instagram (150,5 ribu) dan Facebook (214,2 ribu) menunjukkan potensi audiens yang besar. Tim kerja humas perlu meningkatkan respons terhadap komentar untuk membangun loyalitas di media sosial.

ISK.1.1.2 Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sebagai badan publik, Ditjen PSDKP perlu memahami persepsi publik terhadap isu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. *Media monitoring* atau pemantauan media menjadi alat penting untuk memantau dan menganalisis sentimen pemberitaan yang terdiri dari pemberitaan positif, netral dan negatif. Hal ini bertujuan agar Ditjen PSDKP dapat lebih cepat

dalam merespons opini publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperbaiki kinerja dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sentimen pemberitaan positif, netral dan negatif dipantau melalui media cetak, media online dan media elektronik dengan kerjasama pihak ketiga. Media pemberitaan yang disortir adalah media yang terdaftar dalam Dewan Pers, sebanyak dua kali dalam sehari pada pukul 08.00 WIB dan 20.00 WIB. Realisasi kinerja persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tersaji pada tabel 3.2

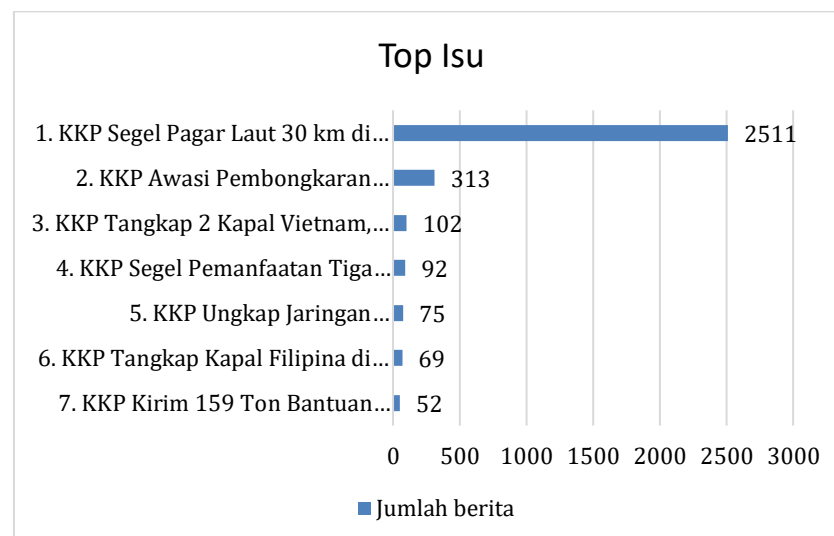
Tabel 3.2 persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator kinerja	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang Pengawasan SDKP					
Tahun	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
2029	89	-	-	-	-	-
2025	85	-	-	-	98,31	115,7%
2024	85	99,23	99,32	97,25	99,5	117,06%
2023	85	-	-	-	99,49	117,05%

Dari tabel 3.2 dapat dilihat realisasi kinerja atas indikator kinerja dimaksud sebesar 98,31% dari target 85% atas 59 siaran pers yang dirilis oleh Ditjen PSDKP sepanjang tahun 2025. Pemberitaan yang dianalisis terdiri dari 5.172 pemberitaan netral dan 7.197 pemberitaan positif dari 12.582 total pemberitaan sepanjang tahun 2025. Indikator ini ditargetkan capaian kinerjanya pada periode tahunan seperti penetapan kinerja tahun 2023. Dalam pemberitaan media massa, sentimen pemberitaan terdiri dari 3 (tiga) *tones*, yaitu positif, netral, dan negatif. Sentimen positif berisi dukungan dan apresiasi, baik terhadap lembaga, figur, dan program-program kinerja Ditjen PSDKP. Sentimen positif cenderung menjadi headline utama pemberitaan di media massa. Sentimen netral merupakan pemberitaan yang tidak

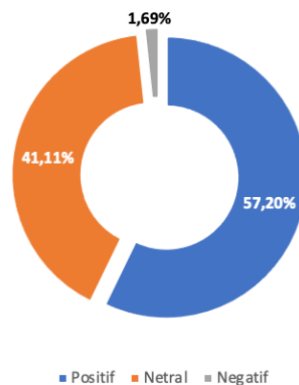
bertendensi negatif ataupun positif. Biasanya berupa deskripsi suatu peristiwa atau penjelasan yang mendukung atau menolak (bersifat *passing mention*) atau suatu hal yang bukan kewenangan dari Ditjen PSDKP. Sedangkan sentimen negatif adalah pemberitaan yang bersifat negatif yang kontra dengan Ditjen PSDKP sebagai institusi, atau Dirjen PSDKP sebagai Dirjen, termasuk yang kontra terhadap program dan kebijakan KKP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

Pemberitaan terbanyak terjadi di bulan Januari terkait isu KKP Segel Pagar Laut 30 KM di Tangerang Banten. Isu tersebut sempat menjadi isu nasional yang bermula dari viralnya video yang diunggah masyarakat terkait keberadaan pagar misterius sepanjang 30,16 km di Laut Tangerang. Pemasangan pagar tersebut diketahui membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal PSDKP kemudian melakukan penghentian sementara aktivitas di sekitar pagar dengan memasang spanduk penyegelan di atas pagar laut. Gambar 3.6 menunjukkan top isu pemberitaan relevan terkait Ditjen PSDKP terbesar, yang dikutip media pada periode 1 Januari – 31 Desember 2025.



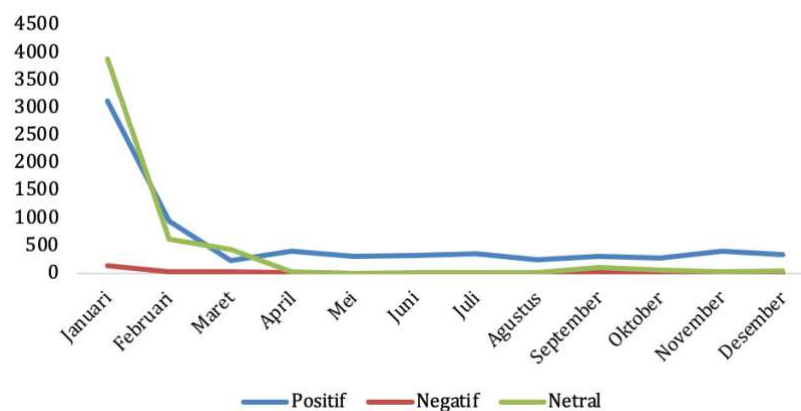
Gambar 3.6 top isu pemberitaan relevan terkait Ditjen PSDKP

Secara persebaran sentimen pemberitaan, sentimen positif mendominasi pemberitaan Ditjen PSDKP pada tahun ini dengan total 7.197 berita (57,2%). Sementara sentimen netral dengan jumlah berita sebanyak 5.172 berita (41,1%). Kemudian, pada tahun ini terdapat 213 berita negatif (1,7%) sebagaimana tersaji pada gambar 3.7



Gambar 3.7 Sebaran sentiment pemberitaan Ditjen PSDKP tahun 2025

Selanjutnya proporsi pemberitaan Ditjen PSDKP menunjukkan 'visibility' terbesar pada bulan Januari dengan jumlah pemberitaan sebanyak 7.131. Pemberitaan tersebut didominasi oleh isu KKP Segel Pagar Laut 30 km di Tangerang. Lebih lanjut, Kota Jakarta Pusat menjadi kota dengan pemberitaan terkait Ditjen PSDKP tertinggi sepanjang tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh masifnya pemberitaan mengenai isu KKP Segel Pagar Laut 30 km di Tangerang. Untuk tren bulan selanjutnya sebagaimana tersaji pada gambar 3.8



Gambar 3.8 Visibilitas pemberitaan Ditjen PSDKP tahun 2025

Meskipun hasil secara keseluruhan pemberitaan pengawasan SDKP sangat positif, terdapat beberapa tantangan atau kendala di antaranya sebagai berikut:

1. Ketergantungan pada Isu Viral dimana lonjakan visibilitas yang sangat tinggi di awal tahun (Januari) menunjukkan bahwa pemberitaan masih sangat dipengaruhi oleh isu reaktif atau video viral dari masyarakat.
2. Penurunan Intensitas (Sustainability) dimana berdasarkan grafik tren bulanan, terdapat penurunan tajam volume pemberitaan setelah kuartal pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya isu besar atau manajemen krisis, eksposur rutin program PSDKP lainnya belum mampu menyamai level visibilitas isu penegakan hukum yang viral.
3. Sentimen Negatif (1,7%) yang juga berpengaruh walaupun kecil, sentimen negatif tetap ada dan pada umumnya berasal dari pihak yang kontra terhadap kebijakan atau program kerja KKP di lapangan.

Beberapa kegiatan yang telah diupayakan untuk mendukung sentimen positif dan netral atas kinerja Ditjen PSDKP antara lain:

1. bimtek kehumasan lingkup Ditjen PSDKP pada triwulan III tahun 2025
2. pendekatan dan penggunaan tagar #PSDKP Sahabat Nelayan

Untuk mempertahankan capaian positif dan meningkatkan stabilitas visibilitas, beberapa rekomendasi strategi ke depan diantaranya sebagai berikut.

1. Strategi Manajemen Isu dan Respon Cepat
 - a. Mainstreaming Keberhasilan, mengingat sentimen positif sering menjadi *headline* utama, Ditjen PSDKP harus secara proaktif mengemas keberhasilan kinerja pengawasan seperti penangkapan kapal ilegal atau pengungkapan jaringan penyelundupan menjadi cerita berseri untuk menjaga momentum pasca-isu Pagar Laut.
 - b. Optimalisasi “Citizen Monitoring”: belajar dari kasus Pagar Laut yang berawal dari video masyarakat, Ditjen PSDKP perlu memperkuat kanal

aduan publik yang terintegrasi dengan media sosial agar institusi selalu menjadi pihak pertama yang merespons isu sebelum menjadi liar di media.

2. Strategi Konten dan Kanal

- b. Diversifikasi Isu Bulanan, untuk menghindari penurunan visibilitas yang drastis seperti di pertengahan tahun, humas perlu menjadwalkan “campaign” bulanan untuk program non-penegakan hukum, seperti edukasi di bidang sumber daya kelautan dan perikanan.
- c. Penguatan Narasi Netral menjadi Positif, mengingat porsi berita netral cukup besar (41%) yang biasanya hanya berupa deskripsi peristiwa, perlu dilakukan upaya *media briefing* agar jurnalis mendapat sudut pandang mengenai dampak positif dari tindakan PSDKP bagi masyarakat nelayan.

3. Mitigasi Sentimen Negatif

Edukasi Kebijakan Kontroversial, untuk meredam sentimen negatif yang kontra terhadap kebijakan, diperlukan sosialisasi berbasis data dan testimoni ahli sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan secara penuh di lapangan.

ISK 1.1.3. Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani

Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP pada tahun 2025 telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi dilakukan terhadap perkara ranah hukum Perdata, Pidana atau Tata Usaha Negara (TUN) yang mengarah pada proses peradilan, sedang dalam proses peradilan, maupun setelah putusan pengadilan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sehingga

mendukung terwujudnya penegakan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam penanganan terhadap permasalahan hukum dilakukan beberapa hal, diantaranya pengumpulan bukti-bukti perkara, persuratan terkait dengan penanganan kasus perkara, penyusunan Surat Kuasa Khusus, jawaban gugatan hingga menghadiri dan/atau melaksanakan proses persidangan.

Adapun target penyelesaian permasalahan hukum pada tahun 2025 sebesar 70% dari permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi yang diajukan. Realisasi kinerja dimaksud tersaji pada tabel 3.3

Tabel 3.3 Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani

Indikator kinerja	Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani		
	Tahun	Target	Realisasi
2025		70	100
2029		70	-

Indikator Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani merupakan indikator kinerja baru dan belum ada sandingan realisasi kinerja dengan unit kerja yang lain dan periode yang lain.

Pada tahun 2025 terdapat lima perkara yang diajukan melalui jalur pengadilan, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) perkara perdata yaitu Gugatan Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN. Btm, di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam.
2. 2 (dua) perkara ranah hukum pidana yaitu Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta dan Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN.Tar, di Pengadilan Negeri Tarakan.
3. 2 (dua) perkara ranah hukum Tata Usaha Negara yaitu gugatan PTUN dengan Nomor Perkara 169/G/2025/PTUN.JKT, dan Nomor Perkara 170/G/2025/PTUN.JKT.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan atas permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi yang diajukan, telah ditindaklanjuti dan ditangani seluruhnya atas perkara hukum tersebut, sehingga persentase permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di lingkungan Ditjen PSDKP pada tahun 2025 telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Pada periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029, target ditetapkan sama sebesar 70%. Lebih lanjut, selama proses penanganan atas permasalahan hukum, terdapat kendala diantaranya:

1. Dengan keterbatasan anggaran untuk koordinasi, pemeriksaan berkas dan pemeriksaan teknis lapangan, maka dilaksanakan secara daring sehingga terdapat beberapa kali kekeliruan implementasi arahan atau kesepakatan
2. Intensitas dan keberlanjutan penanganan permasalahan hukum kerap terkendala keterbatasan SDM dan anggaran

Capaian kinerja yang optimal dan memuaskan melebihi target dapat menggambarkan pelaksanaan penanganan permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di lingkungan Ditjen PSDKP telah berjalan efektif dan memberikan dukungan yang signifikan terhadap terciptanya kepastian hukum, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan akuntabilitas kinerja Ditjen PSDKP.

ISK 1.1.4. Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) yang dilakukan atas perencanaan anggaran melalui Aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 yang telah mengalami perubahan PMK No 27/MK/AG/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektifitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Aspek Efektifitas

sebesar 75 yang terdiri dari Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dengan bobot 30 serta Nilai Efektifitas Satker dengan bobot 45, dan Efisiensi sebesar 25 (penggunaan SBK 10% dan Efisiensi SBK 15%) yang diperoleh dari nilai efisiensi Satker. Realisasi atas indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.4 Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Indikator kinerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP		
	Tahun	Target	Realisasi
	2029	82,5	-
	2025	71,5	85,31
	2024	81	94,01

Indikator nilai kinerja perencanaan anggaran dengan formula dimaksud baru diimplementasikan pada tahun 2024. Target tahun 2025 sebesar 71,50 dengan realisasi sebesar 85,31. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi capaian NKPA Ditjen PSDKP mengalami peningkatan sebesar 3,25.

Perhitungan indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun 2025, tidak mengalami perubahan baik dari sisi perhitungan maupun cara penginputan realisasi output pada Aplikasi SAKTI Modul Komitmen. Data sudah terintegrasi dari Aplikasi SAKTI ke Aplikasi Monev Kemenkeu. Indikator penilaian tersebut ditinjau dari beberapa hal antara lain Indikator Kinerja Program (30%), Penggunaan SBK (10%), Capaian Rincian Output (45%) dan Efisiensi SBK (15%).



Gambar 3.9 Grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP tahun 2025

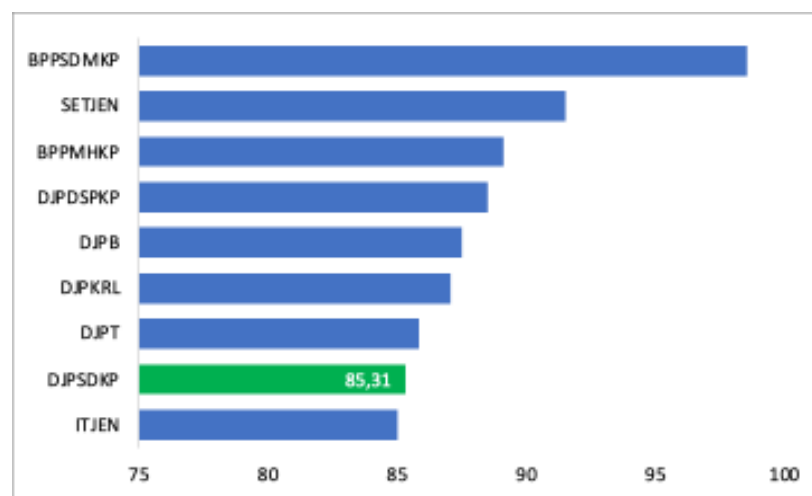
Capaian tahun 2025 sebesar 85,31 diperoleh dari rincian sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Program (IKP), dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian kegiatan program dengan target sasaran program, tahun 2025 sebesar 100 dari bobot 30%
2. Capaian Output Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran, tahun 2025 sebesar 99,45 dari bobot 45%
3. Penggunaan SBK, dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan dalam RKA/KL dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA KL dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU, tahun 2025 sebesar 85,08 dari bobot 10%
4. Efisiensi SBK, diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK, tahun 2025 sebesar 42,15 dari bobot 15%

Dari nilai yang diperoleh secara target telah melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, tetapi jika melihat sub indikator nilai terendah terdapat pada efisiensi SBK (Standar Biaya Keluaran). Nilai efisiensi rendah disebabkan sebagian besar RO yang masuk ke dalam penilaian merupakan RO

SBKK yang memiliki indeks realisasi anggaran lebih dari 20%, sehingga tidak diperhitungkan sebagai nilai efisiensi. Berdasarkan hasil tersebut, proses perencanaan dianggap belum optimal karena indeks yang diajukan di PMK SBK terlalu tinggi.

Lebih lanjut, Ditjen PSDKP berada pada posisi kedelapan untuk unit kerja lingkup KKP dengan NKPA tertinggi pada BPPSDMKP sebesar 98,53, selisih dengan Ditjen PSDKP sebesar 13,22 sebagaimana tersaji pada gambar 3.10



Gambar 3.10 realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran unit kerja KKP tahun 2025

Untuk meningkatkan capaian NKPA tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1. monitoring secara berkala penginputan capaian output pada Aplikasi SAKTI seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP
2. melakukan indentifikasi atas penggunaan SBK dan penetapan SBK tahun 2027 pada lingkup Satker Ditjen PSDKP

ISK 1.1.5 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen pengukuran kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga. IKPA

digunakan sebagai alat evaluasi yang tidak hanya menilai tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga mengukur kualitas perencanaan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketepatan waktu pelaksanaan, serta kesesuaian antara anggaran, output, dan hasil yang dicapai. Realisasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PSDKP tersaji pada tabel 3.5

Tabel 3.5 Realisasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja	Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP				
	Target		Realisasi		Capaian
	TW II	TW IV	TW II	TW IV	
2020	-	88	-	94,78	107,70
2021	80	89	78,71	92,31	103,71
2022	80	89	91,95	94,58	106,26
2023	89	93,75	84,53	91,79	97,91%
2024	-	93,76	-	90,93	96,98%
2025	85	92	97,59	93,45	114,81%
2029		92,2		-	-

Berdasarkan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui aplikasi MONEVPA Kementerian Keuangan sampai dengan periode Desember, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memperoleh nilai IKPA sebesar 93,45. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan dengan kinerja yang sangat baik dan berhasil melampaui target IKPA yang ditetapkan sebesar 92. Adapun capaian setiap sub indikator dapat dilihat pada gambar 3.11



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

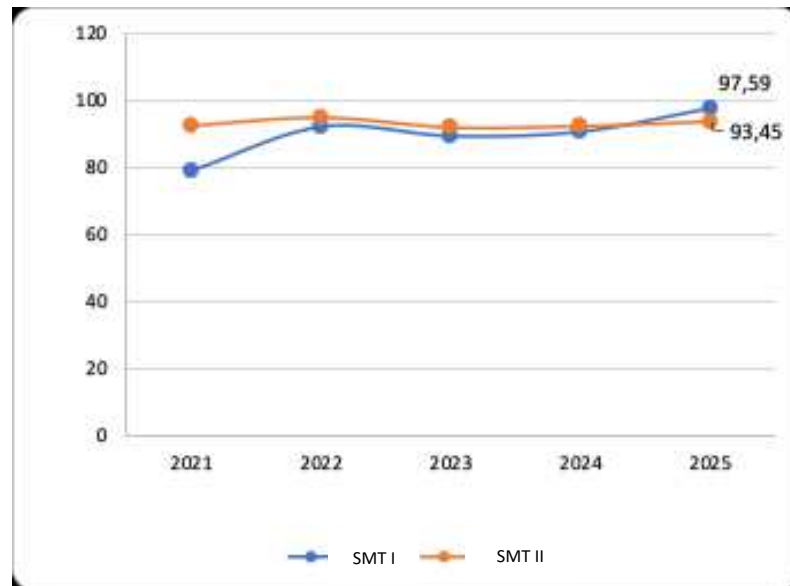
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.36	82.22	97.48	99.62	94.93	100.00	93.45	100%	0.00	93.45
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.80	16.44	9.75	9.96	9.49	25.00				
			Nilai Aspek	92.68		93.56				100.00				

Gambar 3.11 indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025

Secara general indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PSDKP untuk setiap sub indikator sudah memadai dengan kinerja optimal pada revisi DIPA dan capaian output. Namun demikian terdapat penurunan kinerja pada sub

indikator deviasi hal III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, pengeluaran UP dan TUP dimana kinerja semester II lebih rendah dari semester I tahun 2025 sebagaimana tersaji pada gambar 3.12



Gambar 3.12 realisasi indikator nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PSDKP

Dari gambar 3.12 dapat dilihat terdapat penurunan nilai IKPA Ditjen PSDKP dari triwulan II sebesar 97,59 menjadi 93,45 pada triwulan IV. Hal ini disebabkan oleh:

1. penambahan anggaran MFISS sebesar Rp900 milyar yang hingga penilaian IKPA belum terbit SP2D
2. penambahan anggaran pasca relaksasi anggaran dan keterlambatan TUP terakhir pada tanggal 27 Desember 2025
3. blokir anggaran Ditjen PSDKP sebesar Rp14,3 milyar
4. anggaran PNPB MP Tahap III sebesar Rp21,6 milyar yang tidak dapat dimanfaatkan karena target PNPB Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025 yang tidak tercapai
5. belanja kontraktual atas BBM dan pesawat udara

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menjaga stabilitas pelaksanaan anggaran diantaranya:

1. monitoring realisasi anggaran periode pekanan

2. revisi anggaran sesuai kebutuhan strategis organisasi
3. pemutakhiran rencana penarikan dana pasca revisi anggaran
4. sosialisasi pedoman langkah-langkah akhir tahun pelaksanaan anggaran tahun 2025
5. pengendalian berkala salah satunya melalui Jam Pimpinan Mendengar

Secara keseluruhan, tercapainya target IKPA Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan nilai 93,45 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan tujuan penerapan IKPA oleh Kementerian Keuangan. Capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan praktik pengelolaan anggaran yang baik serta mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan pada periode selanjutnya.

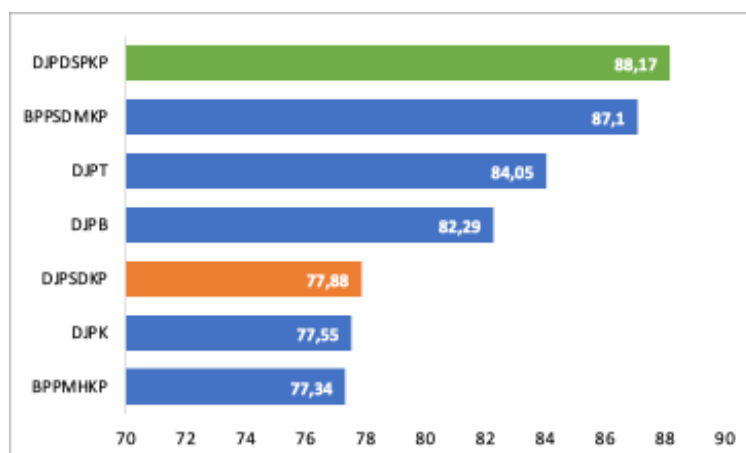
ISK 1.1.6 Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik telah diluncurkan oleh Kementerian PAN dan RB pada Maret 2025, dan telah dilakukan sosialisasi ketentuan Kompetisi Lomba ke Seluruh K/L. Direktorat Jenderal PSDKP telah mengikuti Sosialisasi dan telah menyampaikan ke seluruh Unit Kerja untuk mengikuti Kompetisi Inovasi melalui Surat Nomor : 632/PSDKP.1/OT.730/IV/2025 Tanggal 29 April 2025. Hasil dari kompetisi inovasi tersebut akan diikuti pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian PAN dan RB. Realisasi kinerja indikator Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP tersaji pada tabel 3.6

Tabel 3.6 Realisasi Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2025	77	77,88	101,14%
2029	77	-	-

Indikator dimaksud merupakan indikator kinerja baru untuk Sekretariat Ditjen PSDKP sehingga tidak ada sandingan dengan periode sebelumnya. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik dengan target 77, terealisasi sebesar 77,88 sehingga capaian kinerjanya 101,14%. Pada pelaksanaan kompetisi di lingkup KKP Ditjen PSDKP telah mengusulkan tiga inovasi yaitu 1) Sistem Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Berbasis Masyarakat: Integrasi Kearifan Lokal Panglima Laot dalam Pengawasan Kawasan Konservasi di Aceh yang diluncurkan Dioreltoat Prasarana dan Sarana Pengawasan dengan nilai 77,89, 2) Sistem Terintegrasi Penanganan Pelanggaran SPKP yang diluncurkan oleh Stasiun PSDKP Cilacap dengan nilai 77,40, dan 3) DETECTIVE CUAN (Pengembangan Desa Bebas Destructive Fishing dan Pencemaran Lingkungan) yang diluncurkan oleh Stasiun PSDKP Cilacap dengan nilai 78,36. Dari 30 inovasi yang mengikuti penyeringan di level KKP, Ditjen PSDKP tidak masuk ke dalam 15 besar inovasi yang diusulkan pada KIPP 2025 dan Anugrah Mina Bahari di lingkungan KKP. Penilaian dilakukan secara silang oleh masing-masing eselon I lingkup KKP dan untuk penilaian kinerja merupakan rerata nilai proposal inovasi keseluruhan yang diajukan. Jika melihat nilai proposal inovasi pada eselon I KKP maka Ditjen PSDKP berada pada peringkat kelima dengan nilai proposal inovasi tertinggi sebesar 88,17 oleh Ditjen PDSPKP, diikuti oleh BPPSDMKP dengan nilai 87,1 dan Ditjen PT dengan nilai 84,05 sebagaimana tersaji pada gambar 3.13



Gambar 3.13 Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup KKP tahun 2025

Lebih lanjut, dengan capaian kinerja tersebut terdapat kendala dalam proses inovasi layanan publik di lingkup Ditjen PSDKP, antara lain:

1. Persiapan untuk mengikuti penyaringan KIPP level Kementerian dilakukan dalam jangka waktu yang tidak lama, sehingga tidak optimal pada beberapa bagian.
2. Kriteria lomba inovasi KIPP cukup kompetitif sehingga terdapat beberapa kriteria yang tidak dapat dipenuhi oleh Satker PSDKP sehingga inovasi yang diusulkan tidak banyak.
3. Proposal inovasi yang disusun kurang memadai dalam mendeskripsikan manfaat inovasi bagi masyarakat secara umum serta lemah dalam pendokumentasian sehingga data dukung tidak lengkap.

Kendala tersebut ditengarai oleh beberapa faktor antara lain:

1. inovasi yang dimiliki Satker belum diimplementasikan selama 2 tahun atau inovasi tidak dijaga pemanfaatannya selama 2 tahun.
2. Jika inovasi dimanfaatkan selama dua tahun, Satker tidak mendokumentasikan dengan memadai.
3. Motivasi untuk inovasi pelayanan publik kurang.
4. Meskipun sudah diselenggarakan bimbingan teknis penyusunan proposal inovasi tetapi tidak dilaksanakan dengan memadai khususnya pada pendokumentasian histori dampak inovasi

Atas kendala yang dihadapi, sebagai upaya perbaikan antara lain pada Desember 2025 telah dilaksanakan lomba inovasi lingkup Ditjen PSDKP untuk menjangking inovasi yang layak diajukan pada KIPP 2026. Sedangkan untuk periode selanjutnya, akan dilayangkan Nota Dinas terkait identifikasi transformasi inovasi di setiap unit kerja serta identifikasi dampak inovasi. beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen PSDKP adalah bimtek penyusunan proposal inovasi pelayanan publik dan lomba inovasi Ditjen PSDKP tahun 2025.

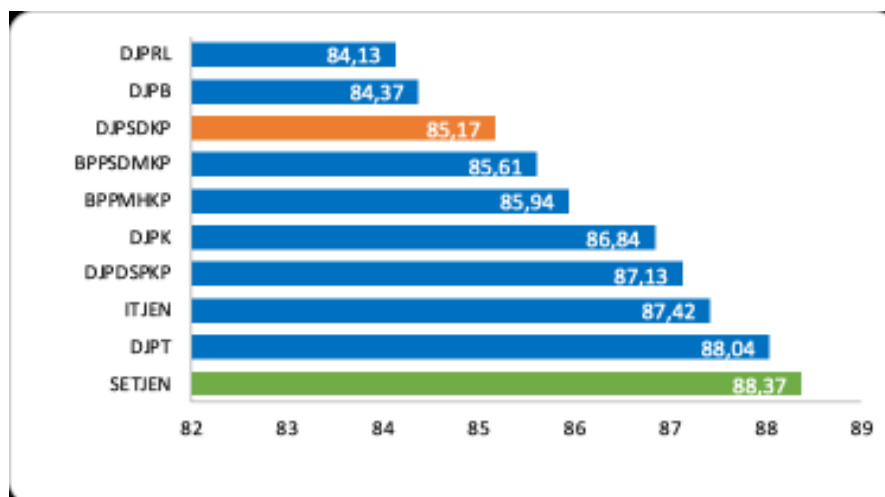
ISK 1.1.7 Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP

Indeks Profesionalitas ASN mendeskripsikan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP di Portal Pegawai yang berbasis data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)/MyASN. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya pada semester I dan II tahun anggaran 2025. realisasi kinerja atas indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP tersaji pada tabel 3.7

Tabel 3.7 Realisasi Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP					
	Target	TW II		TW IV		Capaian
		T	R	T	R	
2020	72	-	-	72	74,39	103,32%
2021	73	65	62,41	73	77,91	106,72%
2022	77	70	71,63	77	80,55	104,61%
2023	78	71	74,98	78	87,50	112,18%
2024	82	77	83,54	82	87,25	106,40%
2025	81	74	82,95	81	85,17	105,14%
2029	83	-	-	-	-	-

Pada tabel 3.7 disajikan pata tahun 2025 dengan target 81, IP ASN Ditjen PSDKP terealisasi sebesar 85,17, sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,14%. Capaian kinerja ini merujuk pada Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 8/SJ.3/TU.210/I/2026. Target IP ASN unit kerja lingkup KKP tidak sama, karena ditetapkan berdasarkan status awal dan kebutuhan kompetensi pegawai di masing-masing unit kerja. Namun demikian, dapat dilihat capaian IP ASN pada unit kerja lingkup KKP sebagaimana tersaji pada gambar 3.14



Gambar 3.14 IP ASN unit kerja lingkup KKP tahun 2025

Berdasarkan gambar 3.14 maka IP ASN Ditjen PSDKP berada pada peringkat kedelapan dari sepuluh unit kerja KKP. IP ASN tertinggi pada Sekretariat Jenderal KKP sebesar 88,37, selisih dengan Ditjen PSDKP sebesar 3,2 poin. Target untuk Ditjen PSDKP sebesar 81 sedangkan untuk Sekretariat Jenderal sebesar 82, merujuk kebutuhan dan kompetensi pegawai di kedua unit kerja tersebut berbeda, dimana demografi pegawai Ditjen PSDKP jabatan fungsional tertentu terdiri dari 910 Pengawas Perikanan, 295 Polsus PWP3K, 405 PPNS Perikanan, dan 377 Awak Kapal Pengawas. Kualifikasi untuk Awak Kapal Pengawas adalah SMA/SMK dan tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan kualifikasi personal, sehingga jumlah pegawai dengan Pendidikan SMA/SMK berpengaruh signifikan pada pencapaian IP ASN Ditjen PSDKP. Lebih lanjut, kendala yang dijumpai diantaranya kurangnya pemahaman pegawai pada mekanisme komponen perhitungan IP ASN khususnya aspek kompetensi sehingga ketika pegawai selesai mengikuti bimtek/diklat/pelatihan/workshop kerap dijumpai salah unggah dokumen pada aplikasi syasn.bkn.go.id. Hal ini turut berpengaruh pada perhitungan IP ASN Ditjen PSDKP tahun 2025.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang upaya peningkatan kompetensi pegawai diantaranya sebagai berikut:

1. Ngobras (Ngobrol Cerdas Bareng Setditjen PSDKP) yang menghadirkan obrolan santai dan diskusi secara daring seputar kesekretariatan selama 3 jam. Pada tahun 2025 terdapat dua edisi Ngobras dengan tema yaitu:
 - a. Pengembangan Kompetensi ASN dan Uji Kompetensi
 - b. Anggaran bicara: perencanaan matang, eksekusi tepat untuk kinerja pengawasan SDKP yang hebat
 - c. Rumus Praktis Jago Nulis dan Deteksi Berita Bohong
 - d. Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Ditjen PSDKP
 - e. Strategi Mencegah dan Menghadapi Gugatan Peradilan
 - f. Ngulik Monev dan SAKIP: Langkah Strategis Capai Target dan Akuntabilitas Kinerja
2. Selain Ngobras, terdapat beberapa diklat teknis antara lain:
 - a. Ruang Ide Komunikasi: Eksplorasi Strategi dan Konten Publikasi Digital
 - b. Pelatihan Daring ECOSOLVE OSINT Workshop
 - c. Sharing Pengoperasian Drone dan Pemetaan dengan QGIS
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043
 - e. Diklat Dasar Asisten Pengawas Perikanan Terampil sebanyak 4 Angkatan yang diikuti oleh sebanyak 178 peserta
3. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain:
 - a. pejabat administrator setara eselon III, Pejabat Pengawas setara eselon IV, Pejabat Pelaksana setara eselon V
 - b. 1 Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Muda, 1 orang Analis SDM Aparatur Ahli Muda, 1 orang Analis SDM Aparatur Ahli Madya, 1 orang Analis Hukum Ahli Muda dan 1 Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Selain upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai juga dilakukan melalui peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN individu

pegawai karena perhitungan komponen diklat 20 JP dihitung secara proporsional berdasarkan riwayat sertifikasi di menu “kursus” dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai serta melakukan monitoring presensi pegawai sebagai upaya memantau tingkat kedisiplinan pegawai.

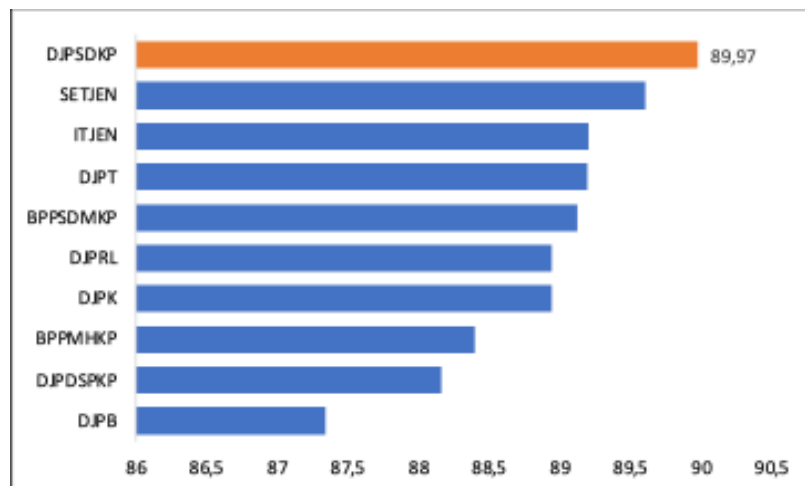
ISK 1.1.8 Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang dikenal sebagai SAKIP, tahun 2025 kembali menjadi salah satu indikator pada unit kerja Sekretariat Ditjen PSDKP dengan target Penilaian Mandiri SAKIP sebesar 88. Realisasi Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP tersaji pada tabel 3.8

Tabel 3.8 Realisasi PM SAKIP Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2029	88,8	-	-
2025	88	89,97	102,24%
2024	84	88,56	105,43%
2023	80,5	82,35	102,29%
2022	80,01	81,73	102,15%
2021	87,15	87,64	107,94%
2020	87	88,86	102,13%

Dari tabel 3.8 dapat dilihat dari target kinerja 88 untuk PM SAKIP Ditjen PSDKP tidak hanya telah terealisasi sebesar 89,97 dengan persentase 102,24% namun juga telah mengalami peningkatan implementasi SAKIP dari periode sebelumnya. Untuk melihat perbandingan realisasi PM SAKIP antar eselon I lingkup KKP tahun 2025 dapat merujuk pada gambar 3.15



Gambar 3.15 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup KKP tahun 2025

Dari gambar 3.15 dapat dilihat PM SAKIP Ditjen PSDKP berada pada peringkat pertama disusul oleh Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal KKP pada peringkat kedua dan ketiga berturut-turut. Untuk unit kerja dengan nilai PM SAKIP terendah tahun 2025, terdapat selisih nilai sebesar 2,63. Ditjen PSDKP kembali membukukan posisi sebagai juara pertama implementasi SAKIP pada tahun 2025 setelah kali terakhir memegang predikat juara pertama pada tahun 2021. Capaian ini merupakan upaya Ditjen PSDKP dari komitmen Pimpinan untuk implementasi AKIP yang memadai, serta partisipasi aktif pegawai untuk tanggung jawab dan transparansi kinerja organisasi.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan implementasi SAKIP yang memadai di masing-masing unit kerja antara lain:

1. Melakukan pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 di unit kerja lingkup Ditjen PSDKP untuk Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan sebagai Unit Eselon II baru.
2. Fasilitasi revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 untuk pergantian Kepala Unit Kerja di UPT PSDKP
3. Melakukan pengukuran dan verifikasi data capaian kinerja pada lingkup Satker Ditjen PSDKP setiap periode kinerja interim

4. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP serta pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Satker lingkup Ditjen PSDKP
5. Pendampingan revisi anggaran sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 untuk efisiensi anggaran
6. Penyusunan Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029

Meskipun predikat juara satu kembali digenggam Ditjen PSDKP tahun 2025 terdapat banyak kendala yang dihadapi antara lain:

1. Banyak operator SAKIP yang baru di hampir sebagian besar Satker lingkup Ditjen PSDKP sehingga membutuhkan pendampingan dan pembinaan yang tidak cukup sekali pada saat persiapan PM SAKIP namun juga pada saat verifikasi capaian kinerja periode interim dan pada bidang kerja lain yang terkait dengan akuntabilitas kinerja antara lain saat pendampingan pembangunan Zona Integritas.
2. Ketiadaan anggaran sebagai dampak efisiensi anggaran untuk menyelenggarakan Workshop SAKIP secara tatap muka. Meskipun telah terdapat e learning SAKIP yang disediakan oleh BPPSDMKP dan Biro Perencanaan Setjen, namun demikian e learning bersifat satu arah sehingga kebutuhan diskusi dua arah belum dapat diakomodir.

ISK 1.1.9 Nilai maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP

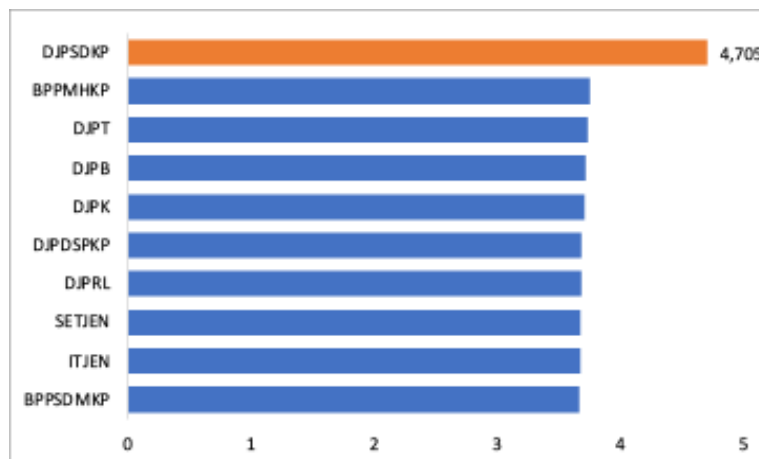
Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah merupakan indikator yang dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran dengan implementasi di sepanjang tahun anggaran. Upaya yang telah dilakukan sebagai wujud implementasi nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP sepanjang Triwulan IV TA 2025 adalah dilaksanakan kegiatan Penjaminan Kualitas atas penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 oleh inspektorat Jenderal. Adapun hasil Penilaian Mandiri Maturitas atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 Berdasarkan Nota Dinas Nomor 3447/SJ.2/TU.210/XII/2025 tanggal 30

Desember 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Komponen Struktur dan Proses memperoleh Nilai 3,703. Dengan rincian per Eselon I Direktorat Jenderal PSDKP memperoleh Nilai terbaik 3,908. Namun demikian berdasarkan Nota Dinas Nomor 260/SJ.2?TU.210/I/2026 tanggal 21 Januari 2026, terdapat perubahan atas Nilai Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 pada komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dari 3,908 menjadi 4,705. Realisasi atas indikator dimaksud tersaji pada tabel 3.9

**Tabel 3.9 Realisasi Nilai maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP
Ditjen PSDKP**

Indikator Kinerja Tahun	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen PSDKP		
	Nilai/Level	Realisasi	Capaian
2021	3	3,87	120%
2022	3	3,80	120%
2023	3.1	3,88	120%
2024	3.3	4.64	120%
2025	3,35	4,705	120%
2029	3,9	-	-

Melihat tabel 3.9 maka Ditjen PSDKP mengalami peningkatan pada Nilai maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP tahun 2025, dan menjadi unit kerja terbaik lingkup KKP tahun 2025, sebagaimana tersaji pada gambar 3.16



Gambar 3.16 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP lingkup KKP tahun 2025

Meskipun predikat terbaik kembali digenggam Ditjen PSDKP tahun 2025 terdapat banyak kendala yang dihadapi antara lain:

1. Terdapat banyak perubahan pada lini masa Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun ini (tentatif) sehingga jika tim asesor tidak berinisiatif mempersiapkan dan menyelenggarakan penilaian lebih dulu, hasilnya tidak akan maksimal.
2. Keterbatasan anggaran rapat dan perjalanan dinas menyebabkan rapat pengisian kertas kerja dan pengumpulan data dukung diselenggarakan terbatas dan kurang intensif.

ISK 1.1.10 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Pengendalian kegiatan berbasis risiko telah diimplementasikan oleh Ditjen PSDKP sejak periode Renstra 2020-2024 pada unit kerja dibawahnya dan dilanjutkan pada periode Renstra berikutnya. Sebagai indikator kinerja yang dihitung capaiannya setiap triwulan maka berikut disajikan realisasi kinerja indikator dimaksud pada tabel 3.10

Tabel 3.10 Realisasi indikator kinerja persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Ditjen PSDKP					
	Target	Realisasi				Capaian
Tahun		TW I	TW II	TW III	TW IV	
2023	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2029	100%	-	-	-	-	-

Pada periode sebelumnya di tahun 2023 dan 2024, persentase pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko dilaksanakan di unit kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP namun pada tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP, indikator kinerja tersebut dilaksanakan di lingkup Ditjen PSDKP. Berdasarkan surat dinas Plt. Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.145/DJPSDKP.1/OT.710/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 Hal Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2025 lingkup Ditjen PSDKP mendapatkan capaian 100%. Nilai tersebut dilihat dari total rencana pengendalian risiko sebanyak 219 yang telah direalisasikan seluruhnya.

Selama tahun 2025, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pengendalian kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. penyampaian surat permintaan penyusunan laporan SPIP dan pemantauan MR
2. melakukan rekap capaian indikator persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko pada unit kerja lingkup Ditjen PS DKP tahun 2025

Sebagai kendala terdapat kegiatan pengendalian yang tidak dilaksanakan karena kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan nomenklatur organisasi, sehingga beberapa kegiatan memerlukan addendum manajemen risiko.

Meskipun pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko tahun 2025 berhasil dilaksanakan 100%, terdapat banyak kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengendalian yang telah direncanakan pada awal tahun sehingga harus menunggu adanya relaksasi maupun dihapus menggunakan nota dinas adendum penghapusan;
2. Adanya rencana kegiatan pengendalian yang ternyata belum relevan dan efektif dalam mengendalikan risiko. Hal ini harus menjadi catatan pada saat penyusunan Form Identifikasi Risiko pada tahun 2026;
3. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia tim SPIP lingkup Ditjen PSDKP dalam melakukan identifikasi risiko, pemantauan risiko, dan penyusunan Laporan SPIP.

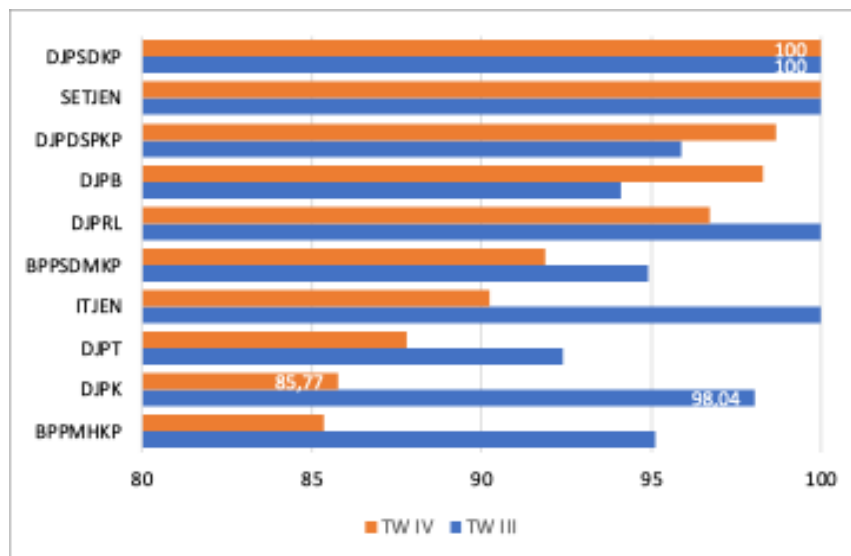
ISK 1.1.11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas fungsi pengawasan internal. Indikator ini menggambarkan sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan oleh APIP/Inspektorat Jenderal yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan, baik yang bersifat audit, reviu, evaluasi dan pemantauan benar ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh Ditjen PSDKP, tidak hanya ditindaklanjuti secara administratif, tetapi digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja Ditjen PSDKP. Semakin tinggi persentase pemanfaatan rekomendasi, semakin besar komitmen Ditjen PSDKP dalam menjadikan hasil pengawasan sebagai instrumen pembelajaran dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Realisasi atas indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.11

Tabel 3.11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP									
	Target %	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian
		T	R	T	R	T	R	T	R	
2029	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	85	85	100	85	100	85	100	85	100	117,65%
2024	80	80	95	80	99,19	80	90,98	80	100	120%
2023	75	75	100	75	95,83	75	92,38	75	100	120%
2022	70	70	46,81	70	95,10	70	96,99	70	99,11	120%
2021	65	65	89,80	65	93,09	65	95,16	65	89,16	120%
2020	60	15	37,93	30	62,65	45	61,72	60	74,04	120%

Dari tabel 3.11 dapat dilihat realisasi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP sebesar 100% dari target 85%. Hal ini merupakan hasil dari upaya menindaklanjuti 250 rekomendasi hasil pengawasan yang terbit di 17 Satker Ditjen PSDKP, dengan jumlah rekomendasi terbanyak pada Sekretariat Ditjen PSDKP sejumlah 90 rekomendasi. Lebih lanjut, Ditjen PSDKP berada pada peringkat satu atas lingkup KKP untuk upaya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, sebagaimana tersaji pada gambar 3.17 Ditjen PSDKP dapat mempertahankan kinerja optimal pada 100% selaras dengan Sekretariat Jenderal KKP untuk periode triwulan III dan IV tahun 2025, namun pada unit kerja level I lain dapat dilihat dinamika kinerja atas upaya tindak lanjut hasil rekomendasinya. Gap terbesar pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dengan penurunan kinerja dari 98,04 pada triwulan III tahun 2025 menjadi 85,77 pada triwulan IV.



Gambar 3.17 persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP

Pemanfaatan rekomendasi pengawasan dapat terlihat melalui berbagai upaya perbaikan, antara lain penyempurnaan kebijakan dan prosedur kerja, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta perbaikan manajemen risiko. Rekomendasi yang diimplementasikan secara konsisten juga berkontribusi dalam meminimalkan terjadinya temuan berulang dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2025, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk optimalisasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring aplikasi SIDAK KKP atas laporan hasil pengawasan (LHP) yang telah diterbitkan oleh Itjen KKP.
2. Melakukan rapat monitoring progres tindak lanjut atas temuan Itjen KKP dengan satker pemilik temuan.

Berdasarkan Nota dinas Sekretaris Itjen KKP Nomor 60/ITJ.0/RC.610/I/2026, tanggal 8 Januari 2026 Hal Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2025, Capaian indikator kinerja Triwulan IV diperoleh dari jumlah

rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Ditjen PSDKP sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 (Triwulan IV Tahun 2025). Dari hari pengukuran kinerja tersebut, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Ditjen PSDKP yang telah tuntas ditindaklanjuti pada periode Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100% yaitu tuntas 250 dari 250 rekomendasi.

Dengan demikian, persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan, tetapi juga menunjukkan kualitas respons manajemen Ditjen PSDKP dalam mengelola perubahan dan perbaikan berkelanjutan. Capaian indikator ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

ISK 1.1.12 Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP

Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan tolak ukur pengendalian risiko ketidakpatuhan dan kelemahan pengelolaan keuangan negara. Penetapan batas tertinggi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap potensi penyimpangan, kesalahan administrasi, maupun ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

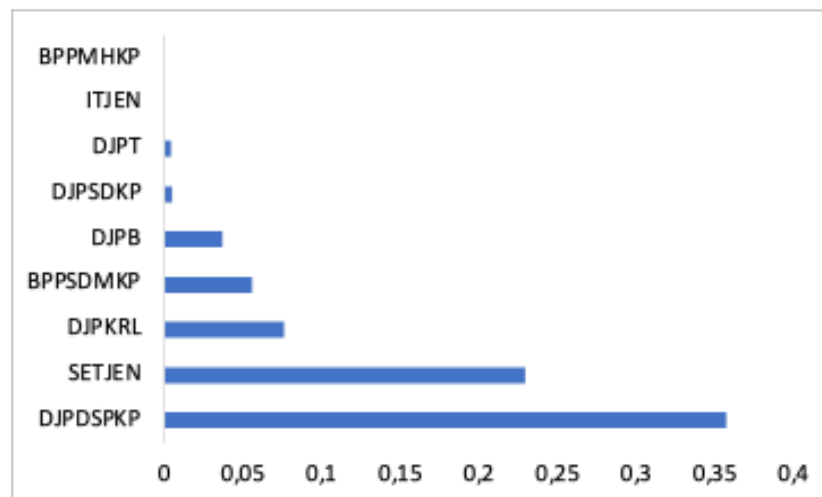
Nilai temuan BPK RI mencerminkan kualitas pengendalian internal, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas

pengelolaan keuangan di lingkungan Ditjen PSDKP. Dengan adanya batas tertinggi nilai temuan, manajemen Ditjen PSDKP didorong untuk meningkatkan pengawasan internal, memperkuat manajemen risiko, serta melakukan langkah-langkah pencegahan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Hal ini juga menjadi instrumen pengendalian agar setiap unit kerja lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya keuangan yang dipercayakan. Selain itu, pengendalian nilai temuan BPK RI berperan sebagai indikator kinerja pengelolaan keuangan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Realisasi atas Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel 3.12

Tabel 3.12 Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	<1	0,01	120%
2021	<1	0	120%
2022	<1	0	120%
2023	<0,5	0,03	120%
2024	<0,5	0,1	120%
2025	<0,5	0,005	120%
2029	<0,5	-	-

Dari tabel 3.12 dapat dilihat bahwa Ditjen PSDKP bisa menjaga performa kinerjanya dari 0,003 dan 0,1 tahun 2023 dan 2024 menjadi 0,005 pada tahun 2025. Jika melihat performa kinerja unit kerja lingkup KKP, maka Ditjen PSDKP berada pada posisi ketiga. Untuk BPPMHKP dan Itjen tidak terdapat temuan pada LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP tahun 2024.



Gambar 3.18 Realisasi Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK KKP tahun 2024

Dengan realisasi 0,005 Ditjen PSDKP mencatat telah menindaklanjuti atas temuan BPK terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi belanja modal yang tidak sesuai konhrak di Pangkalan PSDKP Jakarta dan Stasiun PSDKP Kupang sebesar Rp.25.748.816,- dan pertanggungjawaban belanja barang non 526 yang tidak sesuai ketentuan pada Stasiun PSDKP Cilacap sebesar Rp.24.632184,- yang telah ditindaklanjuti seluruhnya, sehingga tuntas.

Pada tahun 2025, beberapa upaya yang telah dilakukan sebagai upaya perbaikan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban keuangan satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan monitoring atas kelengkapan dokumen permintaan pemeriksaan BPK RI.
3. Melakukan koordinasi dengan satker terkait dokumen pertanggungjawaban keuangan dan dokumen permintaan lainnya khususnya untuk satker yang akan dilakukan sampling pemeriksaan BPK RI dilakukan pemeriksaan pendahuluan.
4. Melakukan rapat monitoring progres tindak lanjut atas temuan BPK RI dengan satker pemilik temuan.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Jenderal KKP Nomor 82/ITJ/RC.610/X/2025, tanggal 7 Oktober 2026 Hal Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP, Capaian indikator tersebut diperoleh dari nilai temuan keuangan pada Tahun 2024 dibandingkan dengan nilai realisasi anggaran Tahun 2024. Dari hasil pengukuran tersebut, Ditjen PSDKP berada di bawah batas tertinggi yang ditetapkan yaitu sebesar 0.005% dari batas 0.5%.

Nilai tersebut, apabila nilai temuan berada di bawah batas tertinggi yang ditetapkan, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas keuangan Ditjen PSDKP. Sebaliknya, apabila mendekati atau melampaui batas tersebut, hasil pemeriksaan BPK RI menjadi dasar evaluasi dan perbaikan sistemik guna mencegah terulangnya temuan serupa pada periode berikutnya. Dengan demikian, penetapan batas tertinggi nilai temuan tidak hanya bersifat pengendalian, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran organisasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

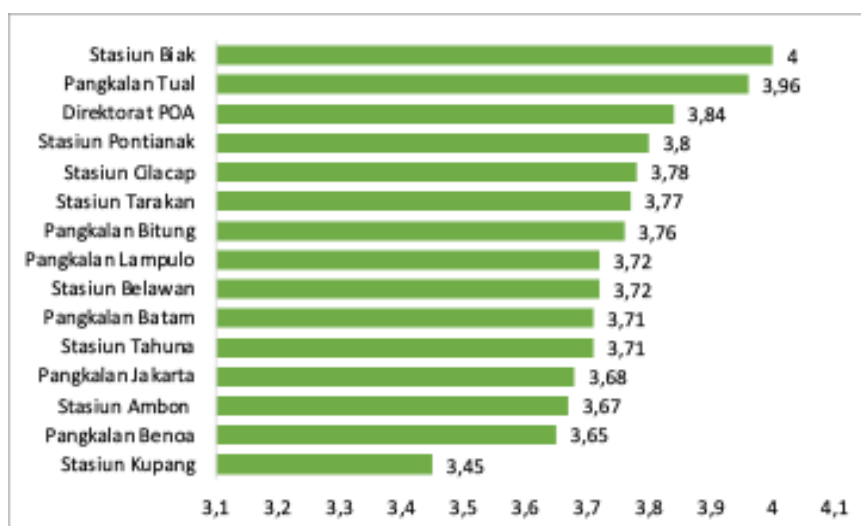
ISK 1.1.13 Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP

Indeks pelayanan publik Ditjen PSDKP diukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025. Produk layanan untuk Ditjen PSDKP antara lain 1) penerbitan surat keterangan aktivasi transmitter 2) pemberian akses pemantauan kapal perikanan, 3) persetujuan penyedia transmitter, 4) penerbitan Surat Laik Operasi (SLO), dan 5) hasil pemeriksaan kapal (HPK) kedatangan. Layanan ini mulai diimplementasikan pada triwulan III. Realisasi atas indikator dimaksud tersaji pada tabel 3.13

Tabel 3.13 Realisasi Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP		
	Tahun	Target	Realisasi
	2025	3,6	3,75
	2029	4,5	-

Indeks pelayanan publik Ditjen PSDKP diperoleh dari rerata hasil survei kepuasan masyarakat pada UPP Ditjen PSDKP yang dikonversikan. Adapun hasil konversi Indeks pelayanan publik Ditjen PSDKP tersaji gambar 3.19



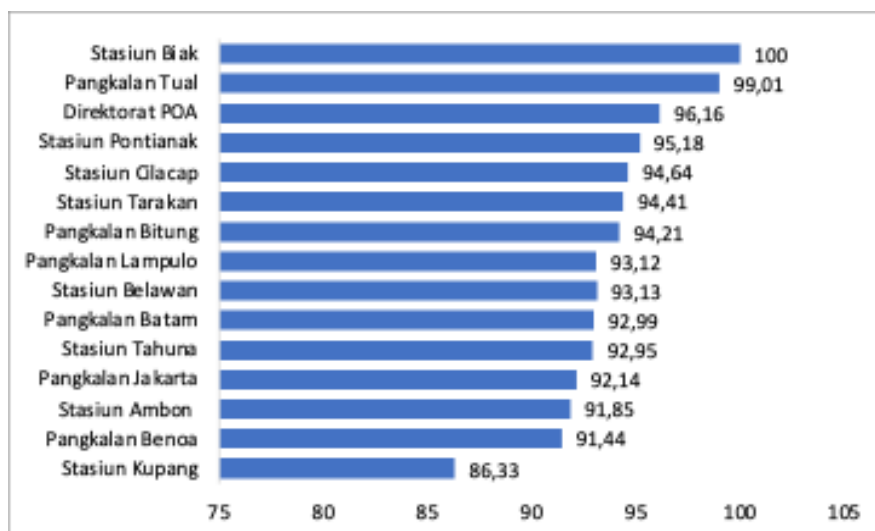
Gambar 3.19 Indeks pelayanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP tahun 2025

Dari tabel 3.13 dan gambar 3.19 dapat dilihat Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP tahun 2025 sebesar 3,75 dari target 3,6 sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,17%. Indeks tersebut merupakan konversi Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP dengan kaidah pengkonversian merujuk Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017. Adapun nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP tersaji pada tabel 3.14

Tabel 3.14 Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP								
Tahun	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV	
		T	R	T	R	T	R	T	R
2025	88,5	80	92,24	83	93,27	86	93,80	88,5	93,81

Dari setiap layanan berdasarkan lokus, maka Stasiun PSDKP Biak merupakan UPP terbaik dengan nilai 100, diikuti oleh Stasiun PSKDP Tual dengan nilai 99,01 dan Direktorat Pengendalian Operasi Armada dengan nilai 96,16. Berdasarkan jenis layanan maka layanan yang terbaik adalah surat keterangan aktivasi transmitter dengan nilai 97,11 diikuti oleh akses pemantauan kapal perikanan 95,75 dan persetujuan transmitter dengan nilai 94,23. Untuk responden terbesar sebanyak 509 responden, terdapat pada Pangkalan PSDKP Batam, sedangkan responden terkecil pada Stasiun PSDKP Tahuna dengan 13 responden. Jumlah responden survei tergantung pada kepadatan kapal nelayan yang mengajukan layanan di wilayah kerja Satker tersebut. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat pada UPP lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada gambar 3.20



Grafik 3.20 Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Setelah dilakukan validasi atas hasil survei triwulan IV tahun 202, dijumpai kendala antara lain:

1. tidak ada informasi lokus responden sehingga menjadi kendala saat analisis hasil survei dan penyampaian justifikasi
2. bias penilaian karena responden merupakan pengguna jasa yang pernah di BAP pada kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
3. terdapat pemilik kapal ijin provinsi yang turut menjadi responden survei
4. salah persepsi oleh responden atas pertanyaan survei terkait pembiayaan

Adapun faktor penghambat yang menyebabkan kendala tersebut antara lain:

1. responden kurang paham pertanyaan survei dengan metode skala likert
2. teknis pengambilan survei belum memperhatikan responden sasaran

Dengan kendala tersebut, sebagai upaya perbaikan dilakukan beberapa aksi antara lain:

1. memperbaiki ketentuan teknis pengambilan responden survei terkait pemilihan responden survei yang netral
2. sosialisasi meningkatkan pemahaman responden terhadap pertanyaan kuesioner

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 diantaranya Evaluasi pelayanan publik lingkup Ditjen PSDKP pada November 2025.

ISK 1.1.14 Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Realisasi atas Persentase penyelesaian program

penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tersaji pada tabel 3.15

Tabel 3.15 Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator kinerja	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		
	Tahun	Target	Realisasi
	2023	80%	100%
	2024	80%	100%
	2025	100%	100%
	2029	100%	-

Untuk lingkup Ditjen PSDKP telah disampaikan 1 usulan Rancangan Kepmen KP tentang RAN Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemberantasan IUUF Tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari Permen KP nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Permen dan Kepmen di Lingkungan KKP tahun 2025. Usulan rancangan Kepmen tersebut saat ini sudah ditetapkan dalam Kepmen KP Nomor 79 Tahun 2025 Tentang RAN Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemberantasan IUUF Tahun 2025-2029 pada tanggal 3 Desember 2025.

Ditjen PSDKP juga telah menyampaikan draft Kepmen KP tentang Hasil Audit Tata Ruang Laut kepada Biro Hukum, yang merupakan tindak lanjut rekomendasi Tim Audit Tata Ruang Laut dan dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 46 ayat (2) Permen KP Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut.

Kepmen KP dimaksud tidak masuk dalam Kepmen KP Nomor 93 tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri namun diusulkan melalui ijin prakarsa, dan pada tanggal 25 Agustus 2025 rancangan Kepmen KP tersebut telah ditetapkan, yaitu Keputusan Menteri KP Nomor 48 Tahun 2025 Tentang

Hasil audit Tata Ruang Laut Tingkat Pusat Atas Pelanggaran PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara.

ISK 1.1.15 Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP

Indek Kualitas Kebijakan Pemerintah bidang Pengawasan SDKP menjadi salah satu indikator kinerja di lingkup Ditjen PSDKP untuk memantau besaran dampak kebijakan pada masyarakat kelautan dan perikanan. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dilakukan pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan dalam metadata indikator kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP. Peraturan yang akan diukur dampaknya bagi masyarakat adalah Permen KP Nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2025 penilaian Indeks Kualitas Kebijakan atas Permen KP dimaksud dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), dimana Permen KP dimaksud mendapatkan poin 89,8125 dari target poin 70. Realisasi atas Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP dapat dilihat pada tabel 3.16

Tabel 3.16 Realisasi Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP

Indikator Kinerja	Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintahan bidang Pengawasan SDKP		
	Tahun	Target	Realisasi
			Capaian
	2020	-	-
	2021	70	74,8
	2022	70	77,56
	2023	70	75,76
	2024	70	80,86
	2025	70	89,82
	2029	70	-

Dari tabel 3.16 dapat dilihat Ditjen PSDKP bisa mempertahankan performa kualitas kebijakan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2022 dengan baik, karena indeks kinerjanya meningkat dari 80,86 tahun 2024 menjadi 89,82 tahun 2025. Untuk periode Renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-

2029 target ditetapkan sebesar 60 pada akhir periode renstra. Kebijakan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya serta melalui koordinasi para pihak dan telah menyelaraskan dengan perubahan kebijakan pemerintah mengenai pengenaan sanksi.

Beberapa upaya yang dilaksanakan untuk mendukung implementasi Kebijakan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan antara lain:

1. sosialisasi kepada pelaku usaha, pengawas perikanan, pengawas kelautan dan pemangku kepentingan lainnya.
2. monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin salah satunya melalui penyebaran kuisioner untuk menampung dan mengetahui kekurangan kebijakan yang akan digunakan sebagai bahan perbaikan atas kebijakan selanjutnya.
3. pemberitaan di media sosial Ditjen PSDKP dan KKP yang sekaligus membuka peluang untuk klarifikasi/pengajuan keberatan atas sanksi administratif.

ISK 1.1.16 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PSDKP

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP. Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

1. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
2. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
3. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)

4. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
5. Pelaporan harta kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
6. Pengendalian kecurangan (bobot 10%)

Indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal. Penilaian ini mencerminkan pelaksanaan reformasi birokrasi, komitmen pimpinan dan jajaran, pemenuhan indikator pada enam area perubahan, serta capaian pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima. Realisasi atas indikator kinerja dimaksud disajikan pada tabel 3.17

Tabel 3.17 Realisasi nilai pembangunan integritas Ditjen PSDKP

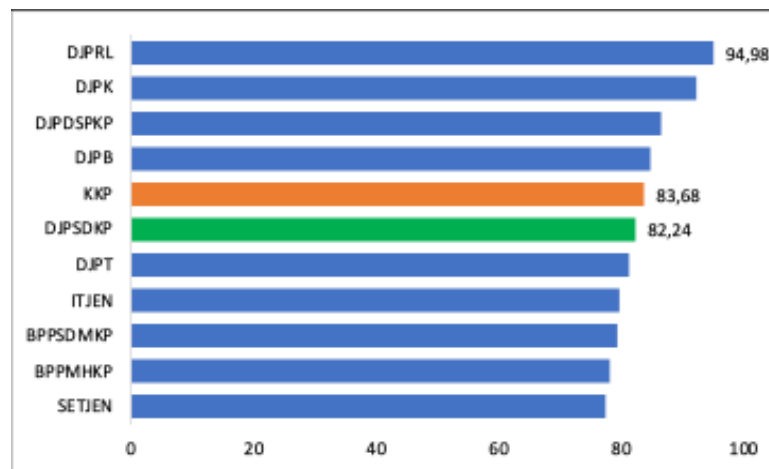
Indikator kinerja	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PSDKP		
	Tahun	Target	Realisasi
	2025	76	82,24%
	2029	80	-

Dari tabel 3.17 dapat dilihat realisasi indikator nilai pembangunan integritas Ditjen PSDKP sebesar 82,24% dari target 76 untuk tahun 2025, realisasi ini sudah melebihi target akhir Renstra 2025-2029. Melihat nilai sub komponen pada tabel .. maka nilai tertinggi pada indikator pembangunan zona integritas yang sudah dicanangkan dan digalakkan secara kontinu oleh Ditjen PSDKP sejak tahun 2018. Hingga tahun 2025, sebanyak 15 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP telah meraih predikat WBK melalui penilaian Tim Penilai Internal (TPI). Selain itu, pada tahun 2025 terdapat 3 (tiga) Unit kerja yang diusulkan untuk mengikuti penilaian pada jenjang Tim Penilaian Nasional (TPN), yaitu Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Bitung.

Tabel 3.18 Hasil LKE pemantauan pembangunan integritas Ditjen PSDKP tahun 2025

Indikator penilaian	Bobot komponen	Persentase
Pembangunan Zona Integritas	30%	22,50%
Program Pengendalian Gratifikasi	15%	12,89%
Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS	15%	13,50%
Penanganan benturan kepentingan	15%	13,35%
Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN)	15%	15,00%
Pengendalian Kecurangan	10%	5%
Total	100%	82,24%

Ditjen PSDKP berada di posisi kelima untuk unit kerja lingkup KKP, dengan nilai pembangunan integritas dibawah KKP. Nilai tertinggi pada Ditjen PRL sebesar 94,98 sebagaimana tersaji pada gambar 3.21 Meskipun Ditjen PRL merupakan unit kerja yang secara nomenklatur baru dibentuk berdasarkan Kepmen KP Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, namun upaya pembangunan integritas Ditjen PRL sangat baik.



Gambar 3.21 Hasil penilaian pembangunan integritas di lingkungan KKP tahun 2025

Adapun kendala dalam pembangunan integritas di lingkup Ditjen PSDKP secara keseluruhan antara lain:

1. Pegawai pengelola data dukung Zona Integritas merupakan pegawai baru dan transfer ilmu belum optimal
2. Satker membutuhkan pendampingan intens dari Pembina tidak hanya secara administratif tetapi juga implementasi riil

Lebih lanjut, meskipun target implementasi pembangunan integritas tercapai terdapat faktor penghambat antara lain:

1. kontinuitas komitmen Pemimpin unit kerja terhadap pembangunan integritas unit kerja
2. ketiadaan reward and punishment atas pembangunan Zona Integritas

Sebagai upaya perbaikan untuk periode selanjutnya direkomendasikan agar dilaksanakan internalisasi pembangunan Zona Integritas dengan lebih menarik dan interaktif serta Pengendalian status Zona Integritas secara berkala. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai implementasi pembangunan zona integritas antara lain:

1. pendampingan pembangunan Zona Integritas untuk WBK pada Satker lingkup Ditjen PSDKP khususnya Dit POA dan 14 UPT PSDKP
2. penanganan pengaduan masyarakat yang diterima melalui *whistle blower system*

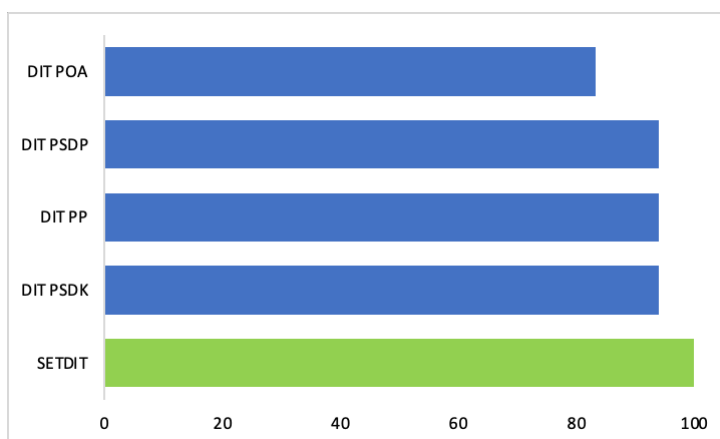
ISK 1.1.17 Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP

Pengelolaan kearsipan Ditjen PSDKP dilaksanakan oleh setiap Satker dan dipantau secara regular. Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Ditjen PSDKP setelah dilakukan Penilaian Eksternal oleh ANRI secara keseluruhan tetap mendapatkan nilai 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Realisasi kinerja indikator dimaksud disajikan pada tabel 3.19

Tabel 3.19 Realisasi nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP

Indikator Kinerja	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP		
	Tahun	Target	Realisasi
	2029	84	-
	2025	80	100
	2024	70	99,90
	2023	70	98,52

Dari tabel 3.19 dapat dilihat bahwa realisasi nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP Sebesar 100%. Merujuk Nota Dinas Kepala Biro Umum KKP Nomor 2087/SJ.6/TU.220/XI/2025 tentang Ralat Pemeringkatan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025, Sekretariat Ditjen PSDKP berada pada posisi pertama lingkup Ditjen PSDKP dengan nilai 100 sebagaimana tersaji pada gambar 3.22



Gambar 3.22 Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Ditjen PSDKP tahun 2025

Tahun 2025 telah dilakukan beberapa aksi sebagai berikut:

1. Pendampingan dalam Rapat Pertimbangan Usul Musnah Arsip Pangkalan PSDKP Benoa dengan Biro Umum untuk menilai JRA Arsip Inaktif sebanyak 11.789 Arsip yang terdiri dari 10.526 berkas arsip dan 1.263 jilid arsip (berbentuk buku).
2. Rencana Sertifikasi JFT SDM Arsiparis lingkup Ditjen PSDKP (Pusat dan UPT) ada sebanyak 25 pegawai telah mendaftar untuk mengikuti sertifikasi, yang terdiri dari 14 pengelola arsip untuk Sertifikasi Pengelolaan Arsip Dinamis dan 11 pegawai untuk Sertifikasi JF Arsiparis dalam rangka perpindahan jabatan. Biaya penyelenggaraan sertifikasi diperkirakan sebesar Rp1,2 Juta/ peserta, yang akan masuk sebagai PNBPN ANRI. Oleh karena itu, diusulkan agar Setditjen PSDKP dapat mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan sertifikasi 25 pegawai dimaksud pada Tahun Anggaran 2026.

3. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Tingkat Unit Kearsipan Eselon I Tahun 2025 serta Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen PSDKP. Tim Penilai PSDKP terdiri dari Faizal Mattola Rellang, Mitaria Fitri K, dan Astharina Widyan Lukmana yang bertugas menilai Inspektorat Jenderal dengan hasil nilai 93,7. Sedangkan hasil penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen PSDKP adalah 100. Dikarenakan Ditjen PSDKP mendapat nilai 100, maka diharapkan dapat dijadikan contoh untuk verifikasi lapangan oleh ANRI dan eselon I lain, jadi untukantisipasi akan ada kunjungan terkait central file di UP dan Record Centre di UK, sebagai catatan di Setditjen PSDKP belum terdapat central file.
4. Penyerahan Fisik Arsip Statis Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada ANRI pada tanggal 17 November 2025 di Kantor ANRI Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan dan Jalan Gajah Mada No. 111, Jakarta Barat. Arsip Statis yang diserahkan Ditjen PSDKP ke ANRI berupa Arsip penyidikan dan laporan satgas 115 sebanyak 41 berkas, dan arsip foto terkait penenggelaman kapal, pemulangan nelayan Indonesia, dan penyevelan pulau sebanyak 28 berkas. Total Arsip Statis KKP diserahkan dalam 9 box dengan rincian 8 box Arsip Statis Ditjen PSDKP dan 1 box Arsip Statis Biro Perencanaan.
5. Penataan dan Pencatatan Arsip Dinamis Bidang Kapal Pengawas milik Direktorat POA dimana dari total 102 box yang tadinya akan diserahkan, sekitar 50 box yang berisi Manual Book Perawatan Kapal dan sejenisnya disimpan kembali sebagai Arsip Vital yang disimpan di Direktorat POA, 44 box proses penyusunan Berita Acara Pemindahan dari Direktorat POA ke Setditjen PSDKP. Setelah pemilahan juga didapatkan 9 box yang akan diproses penyusunan Daftar Usul Musnah.
6. Sinkronisasi manuver penataan dan pelabelan arsip inaktif yang sudah dipindahkan ke record centre dari Direktorat POA sebanyak 85 boks arsip dan 44 boks arsip inaktif dan Direktorat PP ada sebanyak 56 boks arsip. Nomor definitive arsip inaktif terakhir adalah nomor 129, setelah manuver

arsip inaktif Dit. POA Arsip inaktif Ditjen PSDKP menjadi 251 boks arsip. Setelah itu lanjut dilakukan pelabelan pada box arsip kemudian penataan fisik pada rak arsip.

7. Hasil sinkronisasi dan manuver data yang dilakukan selama Triwulan IV bulan Oktober hingga Desember dari unit pengolah telah dipisahkan kurang lebih 200 boks arsip yang sudah tercatat dan akan diusulkan musnah pada tahun 2026.
8. Pemusnahan Arsip Ditjen PSDKP di PT. Indoarsip Kertaskarya Buanasentosa Cikarang pada tanggal 23 Desember 2025 dilakukan secara langsung dengan cara dicacah menggunakan mesin shredder dan disaksikan oleh Arsiparis Biro Umum dan Setditjen PSDKP. Arsip yang dimusnahkan merupakan arsip tahun Tahun 2005 s.d 2014 sejumlah 1131 (seribu seratus tiga puluh satu) jenis arsip dengan rincian dalam lampiran Surat Persetujuan Pemusnahan dari ANRI B/KN.00.01/508/2025, tanggal 19 November 2025 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip. Arsip musnah tersebut yang dimuat dalam 125 boks arsip dan menghasilkan 777 kg arsip cacah.

Dalam pengelolaan arsip lingkup Sekretaria Ditjen PSDKP dijumpai beberapa kendala sebagai berikut:

1. Belum terdapat central file pada UP Setditjen PSDKP sebagai tempat transit arsip yang baru diserahkan dan menunggu untuk diverifikasi sebelum dipindahkan ke Gedung Arsip/ Record Centre Setditjen PSDKP.
2. Tempat penyimpanan arsip inaktif (Gedung Arsip) sudah penuh, sedangkan masih akan terus ada pemindahan arsip dari unit pengolah arsip (Eselon II). Selain itu pada Gedung Arsip/ Record Centre yang ada saat ini belum memiliki prasarana yang lengkap, misalnya belum ada Hydrant, Alarm Kebakaran, Dehumidifier, dan lainnya sesuai dengan ketentuan standar Ruang Arsip dari ANRI.

3. Selain unit kerja yang memiliki arsiparis nilai hasil pengawasan kearsipan internal yang didapat maksimal hanya berada di kisaran 88, karena nilai SDM arsiparis memiliki bobot yang lumayan tinggi.
4. Banyak UPT yang masih belum menerapkan peraturan tata naskah dan kearsipan, sehingga pengumpulan data dukung setiap tahunnya kesulitan

ISK 1.1.18 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP diwujudkan dan diwadahi dalam Lomba Inovasi Ditjen PSDKP tahun 2025 yang merupakan wadah strategis untuk menggali dan mendorong terobosan-terobosan kreatif di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Tujuan Lomba Inovasi untuk menumbuhkembangkan ide / gagasan kreatif guna menanggulangi permasalahan atau meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan merujuk pada inovasi yang dihasilkan pada Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025. Adapun realisasi kinerja indikator dimaksud tersaji pada tabel 3.20

Tabel 3.20 Realisasi Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP		
	Tahun	Target	Realisasi
	2029	80	-
	2025	76	82,52
			108,58%

Merujuk tabel 3.20 dapat dilihat dari target ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025 sebesar 76 telah direalisasikan dengan nilai 82,52. Nilai tersebut merupakan hasil inovasi Pengelolaan Magang Berdampak pada Lomba Inovasi Ditjen PSDKP tahun 2025. Selain Pengelolaan Magang Berdampak yang merupakan kategori unit kerja pusat, Sekretariat Ditjen PSDKP juga berpartisipasi pada Sumbang Saran yang

disampaikan oleh pegawai reynaldi Hutajulu dengan Mentri Semut (Sistem Penghitungan Tunjangan Kerja Cepat dan Tepat). Dengan capaian tersebut, Sekretariat Ditjen PSDKP memperoleh posisi ketiga pada Lomba Inovasi Ditjen PSDKP tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel 3.21

Tabel 3.21 Hasil penilaian Lomba Inovasi Ditjen PSDKP Unit Kerja Pusat tahun 2025

No	NAMA UNIT	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3	RATA 2	Peringkat
1	DIT. POA	89,75	85,80	88,85	88,13	1
2	DIT.PSDP	83,25	83,00	86,20	84,15	2
3	Sekretariat Ditjen PSDKP	84,75	82,00	80,80	82,52	3
4	DIT.PSDK	82,75	77,25	83,90	81,30	4
5	DIT.PSP	79,75	75,00	79,95	78,23	5
6	DIT.PP	75,75	74,00	81,50	77,08	6

Untuk mencapai hasil kinerja tersebut dijumpai kendala dalam perjalanan pengembangan inovasi antara lain:

1. Konsistensi dan semangat Tim Gugus Kendali Mutu Sekretariat Ditjen PSDKP
2. penyiapan dokumen data dukung karena inovasi yang diajukan adalah kegiatan yang sudah diterapkan namun belum didukung oleh pendokumentasian yang memadai

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pengembangan inovasi lingkup Ditjen PSDKP antara lain:

1. pengelolaan magang yang memberikan dampak signifikan bagi mahasiswa magang di lingkup Ditjen PSDKP
2. diskusi tim untuk identifikasi dan analisis inovasi yang akan diajukan pada Lomba Inovasi Ditjen PSDKP tahun 2025

ISK 1.1.19 Nilai implementasi program budaya kerja

Budaya Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP ditetapkan sebagai bagian integral dari upaya membangun sumber daya manusia yang utuh dan berintegritas, sekaligus menindaklanjuti mandat reformasi birokrasi. Budaya kerja ini diwujudkan melalui sebelas program konkret yang dirancang untuk mengubah pola pikir dan perilaku kerja.

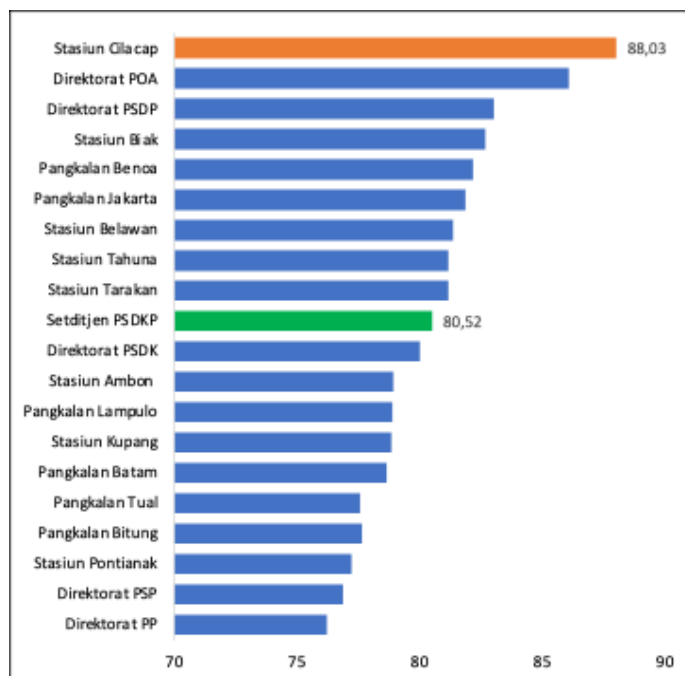
Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendorong transformasi sikap dan perilaku pegawai agar selaras dengan nilai-nilai birokrasi yang berorientasi pada kinerja dan hasil. Program Budaya Kerja ini bertindak sebagai instrumen strategis dalam reformasi birokrasi, yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kontribusi setiap individu dalam mencapai sasaran organisasi.

Direktorat Jenderal PSDKP telah menetapkan nilai-nilai budaya kerja yakni PILAR PSDKP. Kemudian untuk menyamakan budaya ASN maka Presiden RI menetapkan BERAKHLAK sebagai budaya kerja ASN yang berlaku secara nasional. Selanjutnya Ditjen PSDKP menyelaraskan antar budaya kerja PILAR PSDKP dengan BerAKHLAK. Dalam menerjemahkan budaya kerja tersebut disusunlah 11 program budaya kerja yakni Hasilkan Inovasi Unit Kerja, Lima Menit Sebelum jadwal, % R (Ringkas, Rapi, resik, Rawat dan Rajin), Upayakan Data Terkini, Organisasikan Rapat, Catat, Aksi dan Arsipkan, Tegakkan aturan dengan akuntabel dan transparan, belanjakan anggaran secara realistis , akuntabel dan amanah, ASN Produktif Kerja, MANTAP, HARMONIS, dan Go Green. Implementasi atas program budaya kerja tersebut diukur dalam nilai implementasi program budaya kerja, dengan realisasi sebagaimana tersaji pada tabel 3.22

Tabel 3.22 Realisasi Nilai implementasi program budaya kerja

Indikator kinerja	Nilai implementasi program budaya kerja		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2029	74	-	-
2025	70	81,68	116,69%
2024	70	76,86	109,80%
2023	21	25,01	119,10%
2022	21	25,18	119,90%
2021	21	21,18	100,86%
2020	21	21,07	100,33%

Merujuk tabel 3.22 maka implementasi budaya kerja Sekretrariat Ditjen PSDKP tahun 2025 merupakan yang terbaik dalam kurun waktu dua tahun terakhir karena terdapat penyesuaian lembar penilaian pada tahun 2024. dengan capaian tersebut Sekretariat Ditjen PSDKP optimis dapat meningkatkan implementasi budaya kerja pada kurun Resntra 2025-2029 dan dapat mencapai target ditetapkan dengan memadai.



Gambar 3.23 Hasil penilaian implementasi budaya kerja lingkup Ditjen PSDK Tahun 2025

Merujuk gambar 3.23 maka Sekretariat Ditjen PSDKP berada pada posisi kesepuluh diantara 19 unit kerja lingkup Ditjen PSDKP untuk implementasi budaya kerja BerAKHLAK. Implementasi terbaik pada Stasun PSDKP Cilacap dengan nilai 88,03 yang diikuti oleh Dorektorat Pengendalian Operasi Armada dengan nilai 86,09.

Lebih lanjut, upaya yang telah dilakukan untuk mendukung implementasi budaya kerja di tahun 2025 antara lain:

1. perumusan Pedoman Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Budaya Kerja sebagai panduan operasional bagi unit kerja dalam implementasi program budaya kerja, untuk memastikan implementasinya berjalan seragam dan terukur di semua tingkatan organisasi
2. penilaian implementasi budaya kerja seluruh Satker lingkup Ditjen PSDKP
3. penyusunan sistem penilaian digitalisasi untuk budaya kerja

ISK 1.1.20 Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal PSDKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Realisasi atas indikator kinerja dimaksud tersaji pada tabel 3.23

Tabel 3.23 Realisasi nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2029	64	-	-
2025	60	80	120%
2024	60	100	120%
2023	60	100	120%

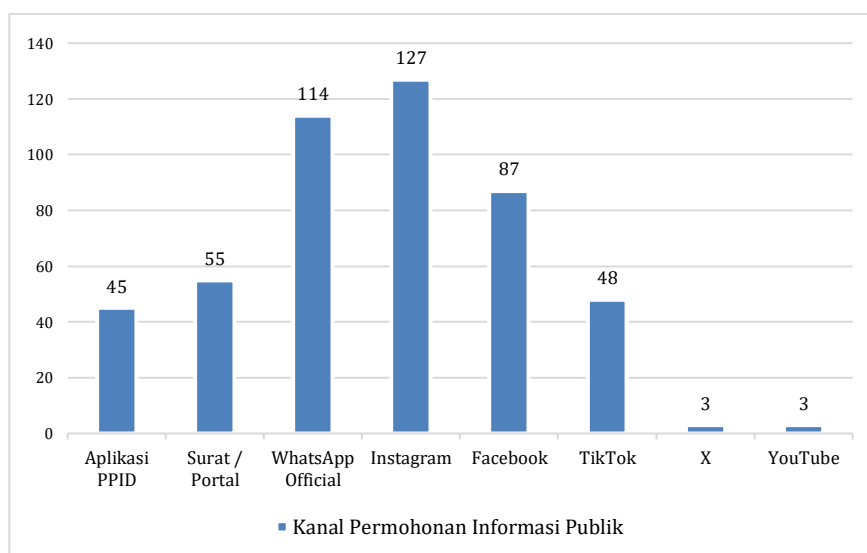
Merujuk tabel 3.23 maka realisasi nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP sebesar 80 dari target 60. Nilai ini meskipun mencapai target ditetapkan tetapi mengalami penurunan dari periode tahun anggaran

sebelumnya. Jika melihat unit kerja lain lingkup KKP maka pada Sekretariat Jenderal KKP memperoleh nilai 100 dari target 96 sebagaimana tersaji pada tabel 3.24

Tabel 3.24 Nilai internal keterbukaan informasi publik

Indikator Kinerja	Nilai internal keterbukaan informasi publik		
Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian
Ditjen PSDKP	60	80	120%
Setjen KKP	96	100	104,17%

Sepanjang tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ditjen PSDKP melayani sebanyak 482 informasi publik yang terdiri dari 55 permohonan langsung atau bersurat, 114 permohonan berasal dari WhatsApp Official, 45 permohonan berasal dari Aplikasi PPID, 127 permohonan berasal dari media sosial Instagram, 87 permohonan berasal dari media sosial Facebook, 48 permohonan berasal dari media sosial TikTok, 3 permohonan berasal dari media sosial X, dan 3 permohonan berasal dari media sosial YouTube. Rata-rata waktu penyelesaian terhadap permohonan informasi publik masih sesuai dengan PerKI SLIP yaitu di bawah 7 hari kerja sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.24



Gambar 3.24 Kanal permohonan informasi publik Ditjen PSDKP tahun 2025

Tidak hanya permohonan informasi, PPID Ditjen PSDKP juga melayani pengaduan yang masuk melalui kanal PPID. Dari 482 informasi publik yang masuk, 162 informasi merupakan pengaduan, sedangkan 320 informasi merupakan permohonan informasi.

Gambar 3.25 menampilkan infografis pemetaan penggunaan kanal, lokasi wilayah, serta isu terbanyak terkait informasi yang dimohonkan melalui kanal PPID Ditjen PSDKP sepanjang tahun 2025.



Gambar 3.25 pemetaan permohonan informasi melalui PPID tahun 2025

Sementara Gambar 3.26 merupakan infografis yang menampilkan pemetaan penggunaan kanal, lokasi wilayah, serta isu terbanyak terkait informasi pengaduan dari publik melalui kanal PPID Ditjen PSDKP sepanjang tahun 2025.



Gambar 3.26 pemetaan pengaduan melalui PPID tahun 2025

Di tahun 2025, telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP yang diselenggarakan oleh PPID KKP dan

memperoleh hasil informatif (nilai 100) berdasarkan penilaian Self-Assessment Questionnaire (SAQ). Selanjutnya, PPID Sekretariat Ditjen PSDKP akan melanjutkan tahapan Monev yakni Uji Publik di awal tahun 2026 bersama 3 Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP lainnya, di antaranya Pangkalan PSDKP Benoa, Pangkalan PSDKP Tual dan Stasiun PSDKP Pontianak. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung keterbukaan informasi publik antara lain:

1. konsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
2. pengumpulan seluruh dokumen informasi publik
3. pengumuman informasi publik melalui media secara efektif dan efisien sehingga dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan
4. membantu PPID KKP dalam menyampaikan informasi publik
5. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan
6. melakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan lingkup Ditjen PSDKP bersama PPID KKP
7. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar informasi Publik
8. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar dapat mudah diakses oleh publik
9. menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik.

Meskipun mencapai target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa aspek yang menjadi kendala atau tantangan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP yang turut berperan pada penurunan nilai keterbukaan informasi publik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, antara lain sebagai berikut.

1. Kesenjangan Pemanfaatan Kanal, dimana terdapat ketimpangan penggunaan kanal yang sangat jauh antara Instagram/WhatsApp dengan

kanal seperti X dan YouTube yang masing-masing hanya menerima 3 permohonan. Hal ini menunjukkan tidak semua kanal dapat dioptimalkan sebagai kanal layanan informasi atau strategi komunikasi di platform tertentu belum optimal sebagai kanal layanan informasi.

2. Beban pengaduan, dimana sekitar 33,6% dari total informasi publik di kanal PPID adalah pengaduan (162 dari 482). Tingginya angka pengaduan ini memerlukan koordinasi teknis yang lebih intensif dengan unit kerja terkait agar penyelesaiannya tetap terjaga di bawah 7 hari kerja.
3. Hanya 3 Unit Kerja dari 14 Unit Kerja yang Lolos Tahap Uji Publik. Belum semua unit kerja memperoleh nilai SAQ 100, hal ini menunjukkan belum adanya konsistensi data dan kemampuan manajerial informasi yang seragam di tingkat pangkalan/stasiun unit Ditjen PSDKP.

Untuk mempertahankan predikat informatif dan untuk meningkatkan kualitas layanan di tahun 2026, dapat direkomendasikan strategi sebagai berikut.

1. Penguatan Layanan UPT. PPID Sekretariat Ditjen PSDKP harus segera melakukan pendampingan intensif bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PSDKP agar kualitas pendokumentasian informasi setara dengan sekretariat di pusat.
2. Integrasi Data melalui pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala dan memastikan ketersediaan dokumen yang sering dimohonkan (seperti data kapal tangkapan) agar dapat diakses lebih cepat.
3. Rejuvenasi Kanal Low-Traffic dengan mengevaluasi fungsionalitas kanal X dan YouTube. Jika tidak efektif untuk layanan informasi, fokus dapat dialihkan sepenuhnya untuk penguatan konten edukatif yang mendorong masyarakat menggunakan Aplikasi PPID yang lebih formal.
4. WhatsApp Automational, mengingat tingginya trafik di WhatsApp Official, disarankan menggunakan fitur *chatbot* berbasis FAQ untuk memberikan jawaban instan atas permohonan informasi yang bersifat umum/terbuka.
5. Service Level Agreement (SLA) Internal dengan menguatkan koordinasi antara PPID Sekretariat dengan direktorat teknis dan UPT dalam

penanganan pengaduan agar alur berifikasi hingga jawaban akhir tetap transparan bagi pemohon.

6. Penyebaran Konten Berbasis Isu Lokal. Meskipun aktivitas PPID sudah mencakup wilayah dari Aceh hingga Papua, konsentrasi permohonan masih dominan di wilayah Jawa dan kota-kota besar. Supaya transparansi informasi dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, kanal media sosial Ditjen PSDKP dapat lebih difokuskan pada topik informasi dengan masalah dominan di wilayah tertentu, misalnya fokus pada isu Illegal Fishing untuk wilayah Sulawesi Utara, dan seterusnya.
7. Kampanye Iklan Berbasis Lokasi (Geo-fencing) dengan melakukan kampanye digital terarah di media sosial untuk menargetkan pengguna di wilayah dengan tingkat permohonan informasi rendah.

ISK 1.1.21 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP

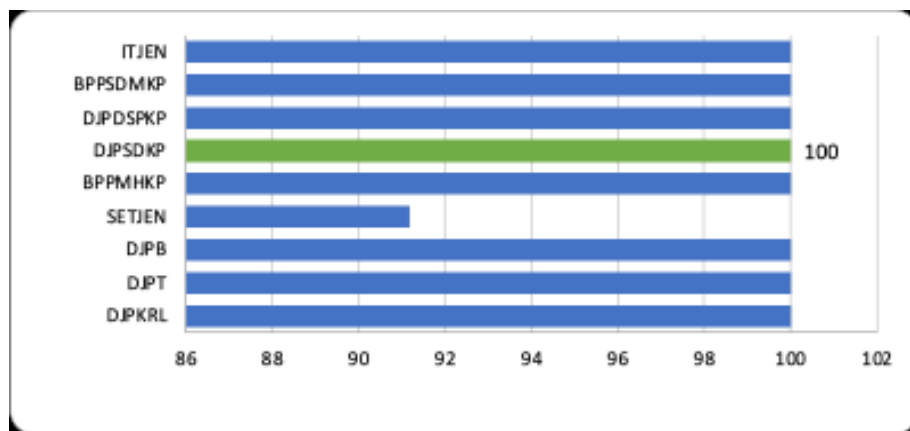
Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Aplikasi SIRUP) Ditjen PSDKP dan merupakan upaya optimalisasi kinerja perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2025. Langkah ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengadaan yang berdampak efisiensi belanja anggaran serta memastikan bahwa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan tidak diumumkan pada Aplikasi SIRUP. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga belum ada sandingan capaian kinerja.

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Realisasi indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.25

Tabel 3.25 Realisasi persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP tahun 2025

Indikator kinerja	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP Tahun 2025					
Tahun	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
2025	76	99,93%	100%	100%	100%	120%
2029	80	-	-	-	-	-

Hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase RUP di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang diumumkan pada Aplikasi SIRUP Triwulan IV Tahun anggaran 2025 adalah 100%. Dari 15 Satker seluruhnya tepat 100% dalam melaksanakan pengumuman pengadaan. Untuk persentase RUP lingkup KKP dapat dilihat pada gambar 3.28 melihat realisasi pengumuman pengadaan pada aplikasi SIRUP tahun 2025, Ditjen PSDKP mengalami perbaikan performa dari triwulan I dengan koreksi 0,07% dari total pengadaan menjadi 100% di setiap periode pemantauan berikutnya.



Gambar 3.27 Grafik Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diunggah pada aplikasi SIRUP lingkup KKP Triwulan IV tahun 2025

Sebagai upaya optimalisasi rencana umum pengadaan lingkup Ditjen PSDKP, telah dilakukan moneyv berkala untuk penginputan RUP Satker lingkup Ditjen PSDKP dan pembuatan kertas kerja efisiensi.

Adapun kendala yang dialami dalam perhitungan persentase RUP yang diumumkan pada Aplikasi SIRUP adalah dengan adanya blokir anggaran maka

pagu yang diumumkan tidak sama dengan pagu pengadaan, sehingga perlu konfirmasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ISK 1.1 22 Persentase implementasi kerja sama

Persentase Implementasi Kerja Sama pada Tahun Anggaran 2025 mencerminkan tingkat realisasi pelaksanaan kerja sama luar negeri dan dalam negeri yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Implementasi kerja sama dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan sinergi pengawasan, operasi terpadu, peningkatan kapasitas, serta penyusunan dan penandatanganan dokumen kerja sama strategis. Realisasi indikator persentase implementasi kerja sama tersaji pada tabel 3.26

Tabel 3.26 Persentase implementasi kerja sama

Indikator kinerja	Persentase Implementasi Kerja Sama		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2029	80	-	-
2025	80	80	100%
2024	80	80	100%
2023	80	100	120%

Secara umum, capaian implementasi kerja sama sepanjang Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif dan berkelanjutan. Pada kerja sama luar negeri, Ditjen PSDKP berhasil menjaga keberlangsungan kerja sama operasional dan peningkatan kapasitas dengan mitra internasional, khususnya dalam kerangka pengawasan perikanan lintas batas dan pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Sementara itu, pada kerja sama dalam negeri, Ditjen PSDKP secara konsisten mendorong penyusunan dan penyiapan dokumen kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan lembaga non-pemerintah sebagai dasar penguatan sinergi pengawasan SDKP di tingkat nasional dan daerah.

Adapun kegiatan implementasi kerja sama merupakan kelanjutan dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya, antara lain:

1. bidang kerja sama luar negeri, Ditjen PSDKP melaksanakan koordinasi rutin, partisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang difasilitasi ABF, serta pertukaran data dan informasi secara reguler terkait nelayan yang diduga melakukan pelanggaran lintas batas perairan Australia. Selain itu, delegasi Ditjen PSDKP juga berpartisipasi dalam berbagai forum dan pelatihan internasional terkait penegakan hukum perikanan dan kerja sama maritim regional.
2. bidang kerja sama dalam negeri, kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan konsep Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PSDKP dengan Ditjen Imigrasi, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Yayasan WWF Indonesia, serta Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara, serta analisis dan persiapan perpanjangan perjanjian kerja sama yang akan berakhir pada awal Tahun 2026.

Capaian implementasi kerja sama selama Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor pendukung, antara lain komitmen pimpinan dan unit kerja dalam mendorong penguatan kerja sama strategis, keberlanjutan hubungan baik dengan mitra utama, serta relevansi substansi kerja sama dengan isu prioritas nasional dan regional di bidang pengawasan perikanan.

Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat, khususnya ketidaksinkronan jadwal koordinasi dengan mitra luar negeri, perbedaan tingkat keaktifan mitra kerja sama, serta belum optimalnya mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan implementasi kerja sama, terutama pada kerja sama dalam negeri.

Sebagai tindak lanjut dan rencana perbaikan pada Tahun 2026, Ditjen PSDKP akan memfokuskan upaya pada penguatan kualitas implementasi kerja sama, tidak hanya pada aspek jumlah kegiatan atau dokumen, tetapi juga pada dampak dan keberlanjutannya. Langkah-langkah perbaikan yang

direncanakan antara lain peningkatan intensitas dan efektivitas komunikasi dengan mitra kerja sama, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala, pengembangan sistem pelaporan implementasi kerja sama berbasis digital, serta penajaman rencana aksi kerja sama agar lebih terukur dan selaras dengan prioritas pengawasan SDKP. Selain itu, kerja sama luar negeri akan diarahkan pada penguatan program peningkatan kapasitas dan pertukaran data lintas batas, sementara kerja sama dalam negeri difokuskan pada optimalisasi peran pemerintah daerah dan mitra strategis dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan

ISK 1.1.23 Indeks efektivitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU

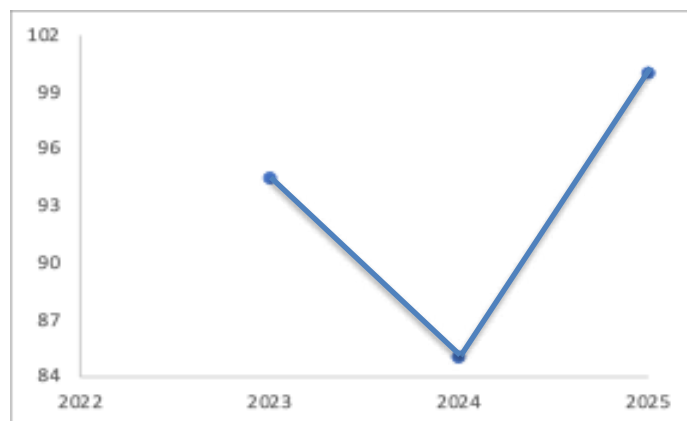
RPOA IUU sebagai inisiatif regional disepakati tahun 2007 di Bali oleh 11 negara antara lain Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor-Leste dan Viet Nam, untuk mempromosikan tata kelola perikanan yang bertanggung jawab termasuk mendorong penguatan pemberantasan IUU fishing. Indonesia sebagai Sekretariat RPOA-IUUF sejak tahun 2009 sampai saat ini, dengan mandat utama memfasilitasi pelaksanaan *Annual Workplan* serta mendukung proses pengambilan keputusan dan kerja sama teknis antarnegara peserta. Target dan realisasi kinerja Indeks efektivitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU disajikan pada tabel 3.27

Tabel 3.27 Realisasi Indeks efektivitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU

Indikator kinerja	Indeks efektivitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	80	100	120%
2024	80	80	100%
2025	80	100%	120%
2029	80	-	-

Merujuk tabel 3.26 dari target 80% untuk Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU telah terealisasi 100%. Secara umum, capaian kinerja Sekretariat RPOA-IUU sepanjang Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan stabil. Sekretariat mampu menjalankan fungsi layanan kesekretariatan, fasilitasi kegiatan tahunan, serta dukungan terhadap adopsi dan implementasi dokumen RPOA-IUU secara berkelanjutan. Kinerja tersebut tercermin dari terselenggaranya berbagai forum utama, meningkatnya intensitas pertukaran informasi dan data antarnegara peserta, serta keberlanjutan program peningkatan kapasitas yang selaras dengan prioritas regional dalam pemberantasan IUU fishing. Dengan demikian, peran Indonesia sebagai Sekretariat RPOA-IUU tetap terjaga dan diakui oleh negara peserta maupun mitra pembangunan.

Indikator dimaksud sudah diimplementasikan selama kurun waktu tiga tahun pada Sekretariat Ditjen PSDKP sejak 2023, dan mengalami dinamika sebagaimana tersaji pada gambar 3.29



Gambar 3.28 Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU tahun 2023-2025

Pada gambar 3.29 dapat dilihat penurunan efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU pada tahun 2024. Peningkatan performa kinerja pada tahun 2025 didukung oleh:

1. komitmen negara peserta terhadap keberlanjutan RPOA-IUU
2. peran aktif Sekretariat dalam menjaga komunikasi dan koordinasi regional

3. dukungan dari mitra pembangunan dalam bentuk pendanaan dan peningkatan kapasitas.

Selain faktor pendukung diatas, relevansi substansi kegiatan RPOA-IUU dengan isu strategis global dan regional turut memperkuat posisi RPOA-IUU sebagai platform kerja sama yang efektif.

Pada tahun 2025, Sekretariat RPOA-IUU melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan *annual workplan* antara lain:

1. *Workshop on Promoting Flag State Responsibility and the FAO Compliance Agreement 1993 dan 18th Coordination Committee Meeting*
2. penyusunan dan perancangan bahan publikasi RPOA-IUU yang meliputi *newsletter*, konten media sosial, dan pengelolaan website untuk edisi kuartal IV Tahun 2025
3. memformulasikan proposal dan rencana kegiatan untuk pendanaan dari Pemerintah Kanada dan Pemerintah Australia terkait tindak lanjut proposal kerja sama yang diajukan dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas
4. mengembangkan *concept note* mengenai *decent working condition on fishing vessels and fishing industry*
5. melakukan korespondensi dengan International Labour Organization (ILO) sebagai bagian dari upaya perluasan isu kerja sama RPOA-IUU
6. memfasilitasi negara peserta dalam penyelenggaraan *Fisheries MCS Training Course* dan *Fisheries Officer Exchange*, termasuk penyusunan dokumen pendukung kegiatan. Di bidang pengelolaan informasi, Sekretariat memperbaharui *RPOA-IUU Watch List* yang terintegrasi dengan data dari *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)* serta memperbaharui *MCS Key Instrument Lists* sebagai sarana pemantauan kemajuan implementasi instrumen regional dan internasional oleh negara peserta.

Namun demikian, terdapat faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi kinerja, antara lain:

1. perbedaan tingkat kesiapan dan kapasitas antarnegara peserta
2. keterbatasan pendanaan untuk mendukung seluruh rencana kegiatan
3. kompleksitas koordinasi lintas negara yang berdampak pada penyesuaian waktu dan cakupan pelaksanaan kegiatan.

Tantangan tersebut memerlukan pendekatan koordinasi yang lebih adaptif dan perencanaan yang semakin matang.

Sebagai rencana perbaikan pada Tahun 2026, Sekretariat RPOA-IUU akan memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas dan dampak kegiatan, tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari keberlanjutan hasil yang dicapai. Langkah perbaikan yang direncanakan meliputi:

1. optimalisasi pengelolaan *RPOA-IUU Website* dan *Knowledge Management Platform*
2. penguatan mekanisme evaluasi dan pelaporan pelaksanaan *annual workplan*
3. peningkatan efektivitas forum konsultatif dan koordinasi
4. Sekretariat akan memprioritaskan pelaksanaan program strategis seperti *Regional MCS Training Course*, *Fisheries Officer Exchange*, *Regional Workshop on Multilateral Fisheries Enforcement* dan *Decent Working Condition on Fishing Vessel and Seafood Industry Workshop* sebagai sarana penguatan kapasitas dan kolaborasi regional.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sekretariat RPOA-IUU Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kesekretariatan dan fasilitasi kerja sama regional berjalan sesuai dengan mandat yang diberikan. Dengan komitmen yang kuat dari negara peserta, dukungan mitra pembangunan, serta rencana perbaikan yang terarah pada Tahun 2026, Sekretariat RPOA-IUU optimis dapat terus meningkatkan kinerja dan kontribusinya dalam

mendorong tata kelola perikanan yang bertanggung jawab dan pemberantasan IUU fishing secara efektif di kawasan.

ISK.1.1.24 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP Ditjen PSDKP

Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian proses bisnis level 2 dan level 3 serta standar operasional prosedur, proses bisnis level 0 dan level 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk proses bisnis level 2 dan level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Proses bisnis sebagaimana pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang KKP bahwa Ditjen PSDKP dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antar unit organisasi didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar unit organisasi. Proses Bisnis mengacu pada PERMENKP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis KKP, dimana proses bisnis ini merupakan kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan organisasi. Realisasi indikator kinerja dimaksud tersaji pada tabel 3.27

Tabel 3.28 Realisasi persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP Ditjen PSDKP		
	Tahun	Target	Realisasi
	2025	65	70
	2029	68	-

Pada tahun 2025 Ditjen PSDKP telah menyelesaikan Proses Bisnis Level 0, Level 1, Level 2 serta Level 3 di lingkungan Ditjen PSDKP dengan capaian

kinerja sebesar 70% telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 65%. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 dan belum ada sandingan dengan periode sebelumnya.

Selanjutnya Ditjen PSDKP telah mengusulkan proses penetapan melalui Keputusan Menteri KP melalui Nota Dinas kepada Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 1345/PSDKP.1/OT.210/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025, tentang Usulan Proses Bisnis dan Uraian Fungsi lingkup Ditjen PSDKP. Proses Bisnis (Probis) Level 1 dan Level 2 lingkup Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pengawasan, dengan Probis Level 2 yaitu :
 - a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan
 - b. Inventarisasi Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pengawasan
 - c. Analisis dan Standarisasi Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengawasan
 - d. Fasilitasi Pemenuhan Kelengkapan Perizinan Prasarana dan Sarana Pengawasan
 - e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengawasan
 - f. Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat
2. Pengendalian Operasi Armada Pengawasan, dengan Probis Level 2 yaitu :
 - a. Penyelenggaraan dan Pelayanan Sistem Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan
 - b. Pengawakan Armada Pengawasan
 - c. Penyiapan Logistik Armada Pengawasan
 - d. Pengendalian Operasi Armada Pengawasan
 - e. Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, dengan Probis Level 2 yaitu:

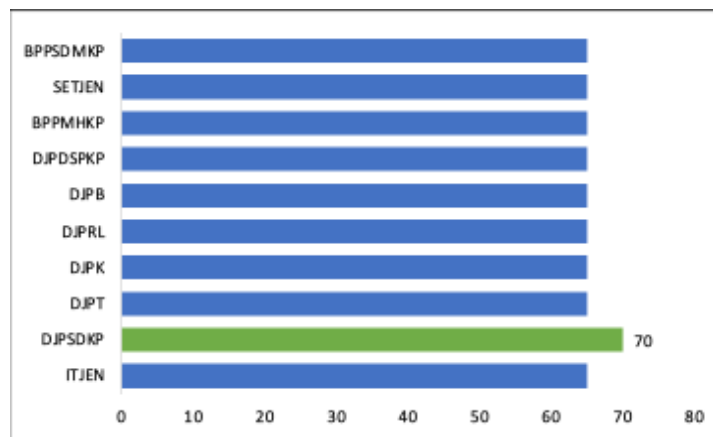
- a. Analisis Data dan Informasi serta Pengendalian dan Pelaksanaan Operasi Intelijen Kelautan
 - b. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut
 - c. Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Wilayah Yurisdiksi
 - d. Pengawasan Pengusahaan Jasa Bahari
 - e. Pengawasan Pemanfaatan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - f. Pengawasan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Laut
 - g. Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - h. Pembinaan, Pengawasan Teknis, dan Pengembangan Sistem Pengawasan Sumber Daya Kelautan
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, dengan Probis Level 2 yaitu:
- a. Analisis Data dan Informasi serta Pengendalian dan Pelaksanaan Operasi Intelijen Perikanan;
 - b. Pengawasan Perikanan Tangkap;
 - c. Pengawasan Pembudidayaan Ikan;
 - d. Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - e. Pengawasan Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. Pengawasan Pencegahan Pencemaran Perairan Darat;
 - g. Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya, dan termasuk Apendiks CITES;
 - h. Pembinaan, Pengawasan Teknis, dan Pengembangan Sistem Pengawasan Sumber Daya Perikanan
5. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan Probis Level 2 yaitu:
- a. Analisis Data dan Informasi serta Pengendalian dan Pelaksanaan Operasi Intelijen Kelautan dan Perikanan;

- b. Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
- c. Pengenaan Sanksi Administratif;
- d. Penanganan Barang Bukti dan Pelaku Pelanggaran;
- e. Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan;
- f. Fasilitasi Ketenagaan PPNS dan Kerja Sama Penegakan Hukum;
- g. Pembinaan, Pengawasan Teknis, dan Pengembangan Penegakan Hukum.

Dokumen Probis Level 3 yang telah selesai disusun dan telah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi tahun 2025 sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) Probis melalui Aplikasi Lucid. Adapun untuk hasil identifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan dokumen Probis Level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, dengan rincian terdiri dari:

- 1. Setditjen PSDKP sejumlah 106 SOP
- 2. Direktorat PSP sejumlah 16 SOP
- 3. Direktorat POA sejumlah 42 SOP
- 4. Direktorat PSDK sejumlah 63 SOP
- 5. Direktorat PSDP sejumlah 60 SOP
- 6. Direktorat PP sejumlah 55 SOP

Dalam penyusunan probis dan SOP, Ditjen PSDKP merupakan unit kerja terbaik lingkup KKP dengan realisasi 70% dibandingkan dengan unit kerja lainnya yang sampai pada tahap 65% penyusunan Proses bisnis dan SOP sebagaimana tersaji pada gambar 3.30, capaian terbaik ini terwujud dengan dukungan dan komitmen Pimpinan yang disinergikan dengan upaya penuh dari tim penyusun Probis dan SOP masing-masing unit kerja.



Gambar 3.29 Grafik realisasi penyelesaian proses bisnis dan SOP unit kerja lingkup KKP tahun 2025

Kegiatan yang dilakukan untuk penyelesaian target proses bisnis Ditjen PSDKP adalah pendampingan intensif pada setiap unit kerja Ditjen PSDKP yang mengusulkan perubahan proses bisnis kinerja pengawasan. Dokumen SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai dengan Matriks Identifikasi Judul SOP sebanyak 18 SOP, sedangkan jumlah SOP yang harus disusun sebanyak 342 SOP. Upaya kedepan Ditjen PSDKP akan melakukan pendampingan teknis kepada seluruh unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis, sehingga dengan tersedianya SOP pada unit kerja dapat mewujudkan penguatan tata laksana di lingkungan Ditjen PSDKP.

A. EFISIENSI SUMBER DAYA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, sepanjang tahun 2025 telah dilakukan upaya efisiensi sebagai tindak lanjut arahan presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Anggaran pada Sekretariat Ditjen PSDKP di awal tahun anggaran 2025 telah mengalami efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan belanja operasional perkantoran. Sebagai rasionalisasi efisiensi anggaran maka diimplementasikan kebijakan *work from anywhere* di lingkup KKP yang juga diimplementasikan di lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP hingga kurun waktu tertentu. Selain itu untuk mengefektifkan waktu, tenaga dan biaya selama beberapa pekan dilaksanakan Ngobras (Ngobrol Cerdas Bareng Setditjen PSDKP) di lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP yang mengangkat

beragam tema seputar layanan dukungan manajerial untuk pengawasan kelautan dan perikanan. Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan enam sesi Ngobras yang diselenggarakan secara daring.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sekretariat Ditjen PSDKP melaksanakan program dukungan manajemen untuk mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan dukungan anggaran di awal tahun 2025 untuk dukungan manajemen sebesar Rp114.096.426.000. Pagu revisi anggaran dukungan manajemen tahun 2025 menjadi Rp89.974.484.000,- dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp81.003.319.353,-. Anggaran dukungan manajemen mengalami efisiensi sehingga terdapat blokir anggaran sebesar 8.796.842.000. Rincian realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025 sebagai mana tertera pada tabel 3.29

Tabel 3.29 Realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP program Dukungan Manajemen Tahun 2025

APBN Perubahan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	64.188.704.000	25.744.140.000	41.640.000	89.974.484.000
Realisasi	64.104.311.657	16.857.367.756	41.639.940	81.003.319.353
Besaran realisasi	99,87%	65,48%	100,00%	90,03%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Atas hasil penghitungan dan analisis capaian kinerja tahun 2025 Sekretariat Ditjen PSDKP dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai kinerja organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025 sebesar 113,11% dari kontribusi 24 indikator sasaran kegiatan, dengan 12 indikator memiliki performa kinerja istimewa dengan capaian kinerja diatas 110%.
2. Ditengah kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025, pagu APBN layanan dukungan manajemen internal Sekretariat Ditjen PSDKP mengalami revisi menjadi sebesar Rp89.974.484.000,- pada akhir tahun anggaran dan telah terealisasi sebesar Rp81.003.319.353 (90,03%). Pada Sekretariat Ditjen PSDKP terdapat blokir anggaran sebesar Rp8.796.842.000, sehingga berdasarkan pagu efektif, maka realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP pada tahun 2025 sebesar 99,86%.
3. Dengan keterbatasan anggaran pasca efisiensi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP tetap memiliki perfomar kinerja yang baik sebagai hasil beberapa upaya terbaik yang dilakukan antara lain 1) pemanfaatan media sosial sebagai *strategic campaign* Ditjen PSDKP dengan masyarakat dan pengguna jasa PSDKP, 2) loyalitas melalui advokasi hukum atas kasus pidana yang menjadi perhatian nasional mampu meningkatkan engagement pegawai atas tugas dan fungsi organisasi Ditjen PSDKP, 3) komitmen Pemimpin unit kerja dan keterlibatan aktif pegawai yang senantiasa dijaga pada lingkungan yang kondusif melalui Jam Pimpinan Mendengar dan Ngobras.

B. SARAN

Berdasarkan hasil monitoring atas capaian kinerja tahun 2025, meskipun terdapat efisiensi anggaran dan menghambat pelaksanaan kegiatan namun

tidak secara langsung menghambat kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP. Lebih lanjut, indikator kinerja dukungan manajemen internal memiliki kekhasan dan dinamika realisasi kinerja sehingga membutuhkan rekomendasi strategi perbaikan untuk periode selanjutnya. Rekomendasi yang tertera pada masing-masing analisis pembahasan, diharapkan menjadi umpan balik pada strategi perencanaan tahun 2026 dan terlaksana dengan memadai.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharta

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

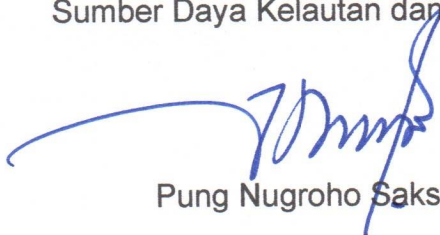
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP



Suharta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	71,5
	2. Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran	100%
	3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92
	4. Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA (%)	100
	5. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	77
	6. Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP	95%
	7. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81
	8. Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88
	9. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,35
	10. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100%
	11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP	85%
	12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%
	13. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5
	14. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen PSDKP	88,5
	15. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,5
	16. Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	100%
	17. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%
	18. Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70
	19. Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	100%
	20. Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK	16
	21. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	80

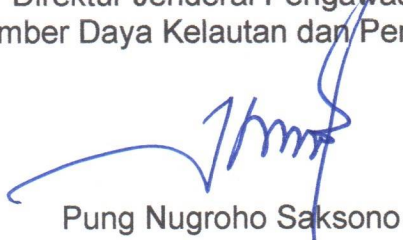
		22. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Setditjen. PSDKP (nilai)	80
		23. Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	78
		24. Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen. PSDKP	83
		25. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	1
		26. Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP (%)	100%
		27. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70
		28. Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	60
		29. Indeks Efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	80
		30. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	76
		31. Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri	80%
2.	Terselenggaranya kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif	32. Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditandatangani	80%
		33. Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	114.096.426.000
Total Anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP Tahun 2025		114.096.426.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP



Suharta



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Umam

Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

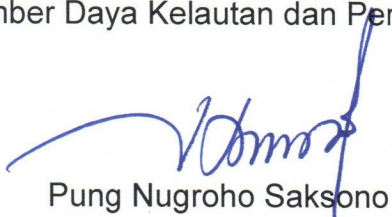
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

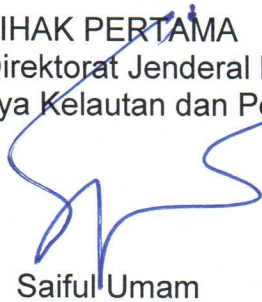
Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Saiful Umam

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	89.974.484.000
Total Anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP Tahun 2025		89.974.484.000

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Saiful Umam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif	1. Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%
		2. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	85%
2.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	3. Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani	70%
3.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	71,5
		5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92
		6. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	77
		7. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81
		8. Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	86
		9. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,35
		10. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100%
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP	85%
		12. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5
		13. Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	3,6
		14. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%
		15. Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70
		16. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PSDKP	77

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
		17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Setditjen. PSDKP (nilai)	80
		18. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	76
		19. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70
		20. Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	60
		21. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	76%
		22. Persentase Implementasi Kerjasama	80%
		23. Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80
		24. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP Ditjen. PSDKP	65%



**SEKRETARIAT DITJEN PSDKP
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**